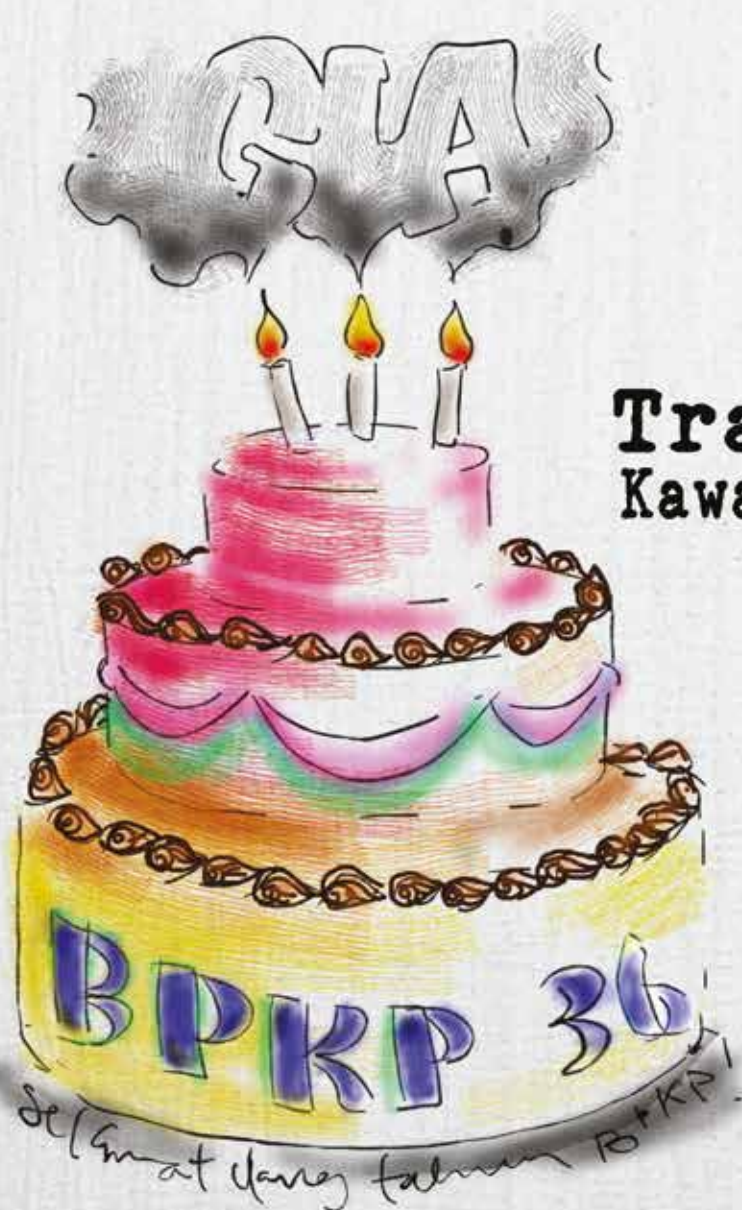




Transformasi
Kawah Candradimuka

APIP



Memoar Perjalanan
BPKP

PENULIS BPKP



Transformasi Perkuat Kompetensi

"Change is inevitable, but transformation is by conscious choice."

- HeatherAsh Amara

Sebagai organisasi yang adaptif, BPKP secara konsisten terus memperkuat dua pilar akuntabilitas yaitu penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk fungsi pembelajaran yang lebih strategis dari yang sudah ada sebelumnya. Untuk menjawab ke-kepo-an para pembaca atas transformasi yang dilakukan, maka di edisi kali ini Warta Pengawasan mengangkat judul "Transformasi Kawah Candradimuka APIP". Ini sejalan juga dengan tema HUT ke-36 BPKP yaitu "Memperkuat Kompetensi Pengawasan Intern yang Berkelanjutan demi Bakti untuk Negeri".

Bagi pembaca yang masih asing dengan konsep *Corporate University*, kami sarankan untuk tidak melewatkan *cover story* yang mengupas mulai dari definisi, urgensi, hingga pengaruh GIA Corpu terhadap penguatan implementasi dua pilah akuntabilitas di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan akan diperdalam pada rubrik *The*

Interview, Kepala BPKP Ardan Adiperdana akan memaparkan bagaimana strategi pembentukan GIA Corpu dalam mendorong pencapaian visi BPKP sebagai *world class internal auditor*.

Pada rubrik *Inspiring Person*, redaksi mengajak pembaca untuk berkenalan dengan Yandy Laurens. Sutradara yang berhasil menghangatkan hati *movie goers* melalui film 'Keluarga Cemara' ini akan membagi pandangannya mengenai pendidikan dan gaya belajar di era digital. Selain isu-isu seputar *governance*, *risk*, dan *control* yang penting untuk diikuti, pembaca juga wajib menyimak ulasan buku, film, dan wisata Indonesia di edisi ini.

Akhir kata, dengan lahirnya strategi pembelajaran yang baru, BPKP dan APIP lainnya dapat terus memberikan manfaatnya yaitu memastikan hasil penyelenggaraan program pembangunan yang berkualitas sekaligus terus berkomitmen tinggi untuk memastikan terjaganya akuntabilitas. Semoga.

Salam Redaksi

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519 **Homepage:** www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Content

The Brief

- 3 Transformasi Pembelajaran Strategis

Cover Story

- 6 *School of Public Sector Governance* Perkuat Pilar Akuntabilitas

Insight

- 12 GIA Corpu Wadah Bagi Komunitas APIP dan Stakeholders, "Tingkatkan Kompetensi Bangun Tata Kelola Yang Baik."

Risk Management Vantage Point

- 16 Mengelola Risiko Individu, Pahami *Kryptonite*-mu

Indonesia This Quarter

- 20 Tiga Komponen Wujudkan Good Governance dan Clean Government
Membangun Budaya Korporasi Anti Korupsi
- 21 Kementerian LHK Capai Level 3 Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
- 22 *Dynamic Capability*
SPIP dan APIP Relevan Dukung *One Observation Policy*
- 23 Apresiasi atas Capaian Level 3 Kapabilitas APIP Badan POM
Kaji Kerja Sama, BPKP dan Bhutan Kembali Gelar *Video Conference*

Communication

- 24 Membangun Hubungan dengan Media, Siapa Takut?

Special Event

- 26 36 Tahun Memperkuat Kompetensi Pengawasan Intern yang Berkelanjutan Demi Bakti Untuk Negeri
- 30 Bukan Kalah atau Menang, yang Penting Semua Senang
- 32 Kita Datang, Kita Riang, Kita Menang
- 34 Meski Terpisah Ruang, Kita Masih Berjumpa dalam Doa
- 36 Beryasyik Masyuk dengan Musik
- 38 Syukuri dengan Memberi
- 40 Grand Launching GIA Corpu
- 42 Nostalgia Kiprah 36 Tahun BPKP

43 SPIP Talk

44 JFA Talk

Inspiring Person

- 46 Ngobrol Bareng Sutradara Film Keluarga Cemara

Book Review

- 50 Orang - Orang Biasa

Movie Review

- 52 12 Angry Men

The Beauty of Indonesia

- 54 *Yuk*, Jalan - Jalan ke Jembatan Gantung

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina :** Sekretaris Utama - **Penasihat :** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Syaifuddin Tagamal- **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santosa, Yus Muharram, Bambang Utoyo, Amdi Very Dharma, Edi Mulia - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Agus Yulian, Rini Wartini, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Catur Iman Pratignyo - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Pemimpin Administrasi:** Ratna Wijihastuti- **Redaktur Pelaksana:** Dian Setyawati, Nadia Khaerunnisa- **Redaktur:** Pujito, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N. - **Redaktur Foto:** Sri Lestari - **Sekretaris Redaksi:** Hilwiya Agustine- **Reporter:** Suryo Cahyo Putro, Gilang Rahmat Hastanto, Ayu Isni Arum, Nadia Khaerunnisa **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah- **Dokumentasi:** Edi Purwanto, Adi Sasongko - **Sirkulasi:** R. Hanifah

Transformasi Pembelajaran Strategis

"Learning is a constant process of discovery – a process without end,"

Bruce Lee.

Peter Michael Senge, pendiri dari *Society of Organizational Learning (SOL)*, dalam buku yang ditulisnya hampir dekade yang lalu berjudul *The Fifth Discipline: The Art and Practices of Learning Organization* menyampaikan bahwa dalam dunia yang semakin terkoneksi serta bisnis yang kompleks dan dinamis, kecepatan belajar menjadi satu-satunya keunggulan kompetitif jangka panjang. Ia pun menekankan bahwa selain kecepatan, saat ini sudah tidak memadai lagi bertumpu hanya pada satu orang yang belajar untuk organisasinya. Se-

“

Corpu mengacu pada program pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan sistematis, serta terkait dengan pencapaian visi-misi dan strategi organisasi.



di Indonesia, konsep Corpu mulai bergaung sekitar satu dekade kemudian, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN dan Perbankan.

harusnya, pembelajaran diikuti oleh seluruh anggota organisasi di semua level atau disebut menciptakan ekosistem organisasi pembelajar (*learning organization*).

Didukung dengan relevansinya terhadap kondisi yang ada, Konsep Peter M. Senge tersebut ternyata mampu memicu lahirnya terobosan-terobosan di berbagai organisasi dalam proses peningkatan kompetensi anggota organisasinya. Menggunakan istilah *Corporate University* (Corpu), pada tahun 1990-an, berbagai perusahaan di Amerika Serikat mulai membangun praktik pembelajaran organisasi yang difokuskan pada pelatihan dan pengembangan internal. Di periode waktu yang hampir sama, perusahaan-perusahaan di Eropa seperti Shell dan Phillips juga mulai membangun *corporate universitas*-nya. Sedangkan

Apa itu *Corporate University*?

Meskipun konsep Corpu sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2000-an, istilah Corpu sejatinya masih belum dikenal luas oleh masyarakat hingga saat ini. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan dari pihak-pihak yang belum memahami konsep Corpu dan membedakannya dengan universitas atau pusat pelatihan yang sudah ada saat ini. Pertama, apa perbedaan antara Corpu dengan universitas?. Bagi kita yang belum memahami konsep Corpu secara paripurna, mungkin masih ada yang memahami Corpu sebagai universitas (tradisional) yang dimiliki oleh perusahaan/ organisasi. Meskipun tidak sepenuhnya salah, terutama terkait kepemilikan, namun fokusnya bukanlah bukan pada kepemilikan tersebut. Secara ringkas, Corpu dibangun guna melayani pendidikan dan pengembangan pegawai dan

mitra lainnya demi kemajuan organisasi. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai organisasi, Corpu kemudian menentukan kebutuhan pembelajaran yang diperlukan. Sedangkan universitas umum yang ada dibangun untuk melayani pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat umum dengan kurikulum pendidikan yang relatif sama dengan universitas lainnya, dan tidak ada hubungannya dengan upaya meningkatkan kinerja organisasi. Karena itu, Corpu secara umum dapat dikatakan sebagai fungsi pembelajaran yang mempunyai kedudukan strategis, yang di desain untuk membantu organisasi mencapai misi dengan menjalankan aktivitas yang mendorong pembelajaran, pengetahuan, atau *wisdom* individu dan organisasi tersebut. Lalu apa perbedaan pusat pelatihan yang sudah ada (*Training Center*) dengan Corpu?. Secara konsep, Corpu mengacu pada program pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan sistematis, serta terkait dengan pencapaian visi-misi dan strategi organisasi. Sedangkan dalam konsep diklat atau *Training Center*, program pembelajaran menggunakan pendekatan proyek, lebih mengarah pada menutup kesenjangan (*gap*) kompetensi anggota organisasinya.

karena sejak awal Corpu harus memahami strategi bisnis organisasi yang dilayaninya. Selanjutnya, Corpu perlu mengidentifikasi kompetensi orang-orang yang dibutuhkan untuk berhasil menjalankan strategi tersebut. Kemudian, Corpu harus merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk untuk menciptakan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi bisnis organisasi tersebut.

Pada umumnya, organisasi memiliki dua fokus yaitu mengeksploitasi bisnis yang ada saat ini dan mengeksplorasi peluang masa depan. Keduanya membutuhkan kompetensi yang berbeda. Oleh karena itu, Corpu memiliki peran yang strategis untuk mendukung dua fokus tersebut dengan cara menyelenggarakan pembelajaran untuk menutup kesenjangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis saat ini serta mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mengeksplorasi masa depan organisasinya itu ■

Betrika Oktaresa

Kegiatan Utama *Corporate University*

Sesuai dengan *core* utamanya, sudah tentu kegiatan Corpu adaah menyelenggarakan aktivitas pembelajaran, namun dengan fungsi yang lebih luas. Hal ini



School of Public Sector Governance, Perkuat Pilar Akuntabilitas

Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang komprehensif. Tidak hanya berkomitmen untuk mencapai hasil penyelenggaraan program yang berkualitas, namun juga berkomitmen tinggi untuk memastikan terjaganya akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas program pembangunan itu, diperlukan penguatan dua pilar pengawalan akuntabilitas yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP berupaya agar kualitas SPIP di berbagai tingkatan pemerintahan dapat meningkat. Selain itu, BPKP juga melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP dengan fokus meningkatkan kemampuan APIP dalam menjalankan peran pengawasannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPKP untuk

semakin memperkuat dua pilar akuntabilitas tersebut adalah dengan membentuk fungsi pembelajaran yang lebih strategis dari yang sudah ada sebelumnya. Transformasi dilakukan dari Pusat Pelatihan (*Training Center*) yang masih berfokus pada gap kompetensi individu menjadi *Corporate University* yang difokuskan pada isu dan kinerja strategis organisasi, dalam hal ini BPKP dan APIP lainnya.

Latar Belakang GIA Corporate University

Pentingnya penguatan dua pilar pengawasan tentu perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang handal, akuntabel, dan kompeten. Salah satu aspek penting dalam menyiapkan SDM yang diharapkan tersebut adalah dengan menyediakan dan melaksanakan proses pembelajaran tepat dan sesuai (*link and match*) dengan kebutuhan strategis dan peningkatan kinerja organisasi. Kondisi sampai dengan saat ini, pengembangan SDM di BPKP dan pemangku kepentingan dirasakan belum sepenuhnya sejalan dengan rencana dan kebutuhan strategis organisasi tersebut. Sehingga perlu untuk melakukan pengembangan dan transformasi dengan membangun *Corporate University*.

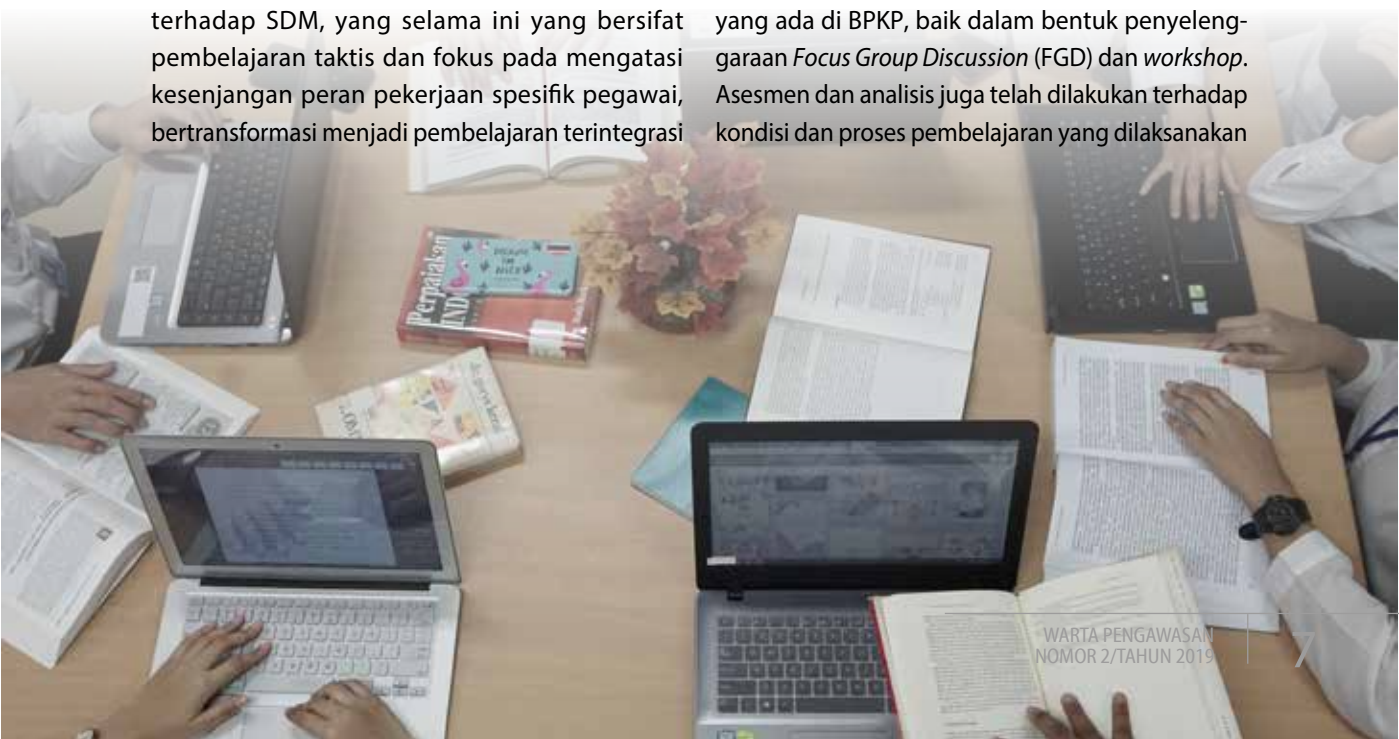
Dengan terbangunnya Corpu ini diharapkan mengubah strategi pembelajaran yang dilakukan terhadap SDM, yang selama ini yang bersifat pembelajaran taktis dan fokus pada mengatasi kesenjangan peran pekerjaan spesifik pegawai, bertransformasi menjadi pembelajaran terintegrasi

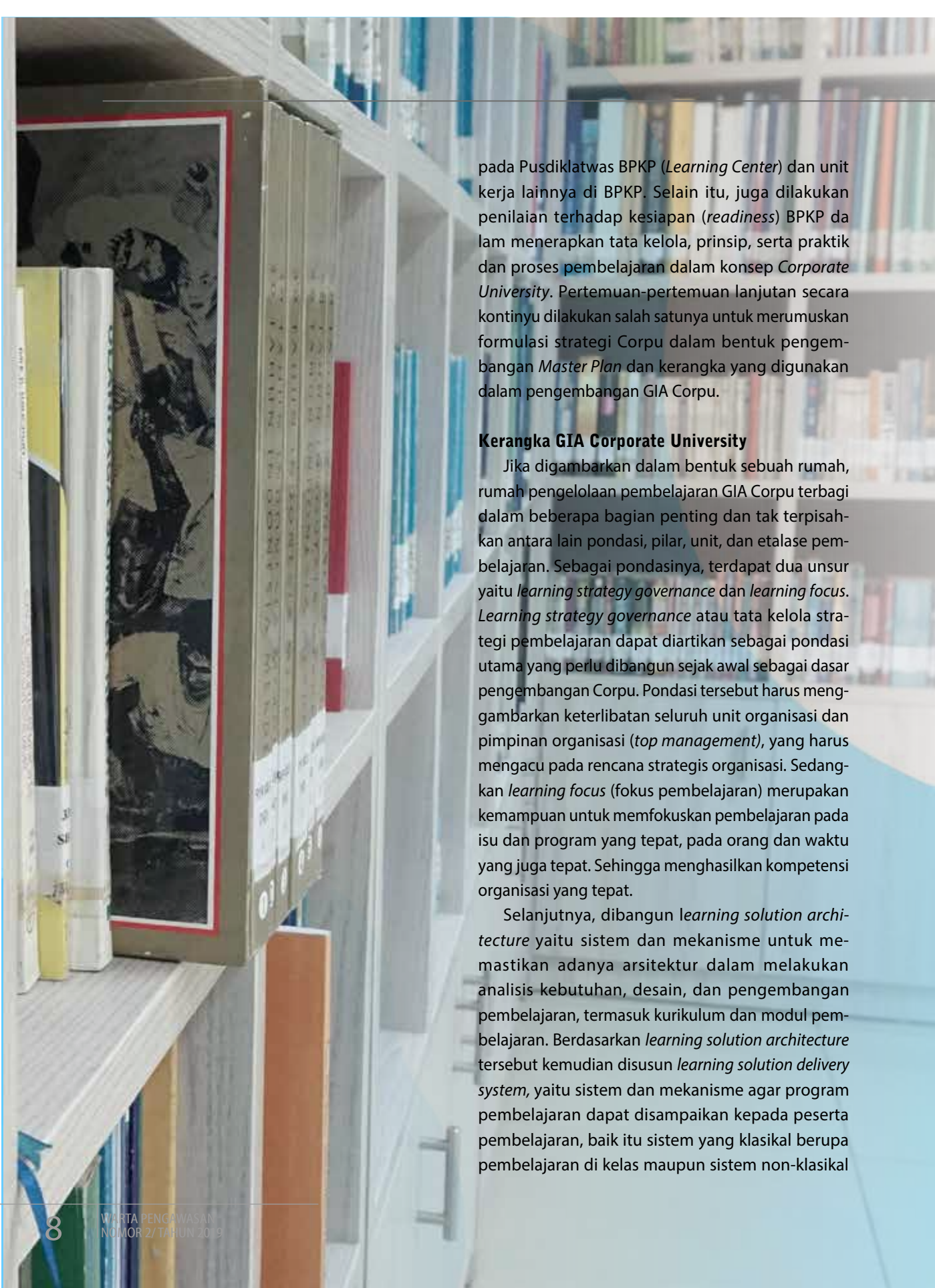
bahkan strategik yang mampu mengembangkan kapabilitas pegawai dan mengintegrasikan seluruh komponen yang mempengaruhi kinerja pegawai dan organisasinya.

Transformasi Menuju GIA Corporate University

Proses pembentukan GIA Corpu merupakan salah satu perwujudan BPKP sebagai organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategisnya. BPKP telah melakukan kajian awal pada tahun 2017, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengenalan penerapan konsep Corpu melalui studi banding (*benchmark*) terhadap beberapa perusahaan dan instansi yang telah memiliki Corpu, diantaranya *Indonesia Port Corporation* (IPC) *Corporate University*, Institute BPJS Ketenagakerjaan, dan Telkom *Corporate University*. Pada sektor publik studi banding dilakukan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan – Kementerian Keuangan (BPPK - Kemenkeu).

Tak berhenti disitu, BPKP menyadari bahwa Corpu akan bisa berjalan efektif jika urgensinya dipahami oleh seluruh pihak di dalam organisasi, terutama unit-unit kerja di dalamnya. Sejak tahun 2018, proses transformasi ini terus dilakukan dengan melibatkan wakil-wakil dari seluruh unit kerja yang ada di BPKP, baik dalam bentuk penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *workshop*. Asesmen dan analisis juga telah dilakukan terhadap kondisi dan proses pembelajaran yang dilaksanakan





pada Pusdiklatwas BPKP (*Learning Center*) dan unit kerja lainnya di BPKP. Selain itu, juga dilakukan penilaian terhadap kesiapan (*readiness*) BPKP dalam menerapkan tata kelola, prinsip, serta praktik dan proses pembelajaran dalam konsep *Corporate University*. Pertemuan-pertemuan lanjutan secara kontinyu dilakukan salah satunya untuk merumuskan formulasi strategi Corpu dalam bentuk pengembangan *Master Plan* dan kerangka yang digunakan dalam pengembangan GIA Corpu.

Kerangka GIA Corporate University

Jika digambarkan dalam bentuk sebuah rumah, rumah pengelolaan pembelajaran GIA Corpu terbagi dalam beberapa bagian penting dan tak terpisahkan antara lain pondasi, pilar, unit, dan etalase pembelajaran. Sebagai pondasinya, terdapat dua unsur yaitu *learning strategy governance* dan *learning focus*. *Learning strategy governance* atau tata kelola strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pondasi utama yang perlu dibangun sejak awal sebagai dasar pengembangan Corpu. Pondasi tersebut harus menggambarkan keterlibatan seluruh unit organisasi dan pimpinan organisasi (*top management*), yang harus mengacu pada rencana strategis organisasi. Sedangkan *learning focus* (fokus pembelajaran) merupakan kemampuan untuk memfokuskan pembelajaran pada isu dan program yang tepat, pada orang dan waktu yang juga tepat. Sehingga menghasilkan kompetensi organisasi yang tepat.

Selanjutnya, dibangun *learning solution architecture* yaitu sistem dan mekanisme untuk memastikan adanya arsitektur dalam melakukan analisis kebutuhan, desain, dan pengembangan pembelajaran, termasuk kurikulum dan modul pembelajaran. Berdasarkan *learning solution architecture* tersebut kemudian disusun *learning solution delivery system*, yaitu sistem dan mekanisme agar program pembelajaran dapat disampaikan kepada peserta pembelajaran, baik itu sistem yang klasikal berupa pembelajaran di kelas maupun sistem non-klasikal

seperti *digital delivery channel*, *coaching*, *mentoring*, *on the job training*, dan sebagainya.

Rumah tersebut dibangun dengan bertumpu pada dua pilar, yaitu *knowledge management* dan *learning infrastructure*. *Knowledge management* menggambarkan serangkaian strategi, sistem, dan teknik yang digunakan oleh individu, tim, dan organisasi untuk mengelola pengetahuan. Selain itu juga bertujuan untuk menghimpun *tacit knowledge* yang dimiliki oleh personil kunci dan mengubahnya menjadi *explicit knowledge* yang dapat dipelajari oleh seluruh personil yang membutuhkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, tidak hanya melekat hanya pada individu tertentu saja. Sedangkan *Knowledge Management System* (KMS) merupakan sistem yang mengidentifikasi, menangkap, menyimpan, membagikan dan menggunakan pengetahuan di organisasi sehingga seluruh unit dalam organisasi dapat belajar dan memperoleh manfaat. Pemanfaatan KMS oleh Corpu sebagai bagian dari *Learning Solution Architecture* dan *Learning Solution Delivery System*.

Satu pilar penting yang lain adalah *learning infrastructure* yaitu berupa sarana, prasarana, fasilitas, dan metodologi untuk menunjang proses pembelajaran dalam organisasi. Infrastruktur pembelajaran akan selalu dikaitkan dengan fasilitas untuk dapat melaksanakan *digital learning*, misalnya dengan membangun *smart-classroom*. *Learning infrastructure* merupakan *building blocks* dalam proses pembelajaran organisasi yang dilaksanakan oleh *learning office*, yaitu divisi, diklat atau pusdiklat.

Komponen Inti Pembelajaran *Corporate University*

Komponen inti dalam Corpu adalah *learning units*, yang dapat diilustrasikan sebagai 'kamar-kamar' pembelajaran. *Learning unit* dapat berbentuk *academy* (akademi) atau *school* (sekolah), dengan pengertian yang hampir sama. Pembentukan dan pengembangan *learning units* disesuaikan dengan

kebutuhan organisasi dan strategi pembelajaran yang ditetapkan. Pada struktur di atas, terdapat *business academy* dan *competency schools*. Struktur ini didukung oleh beberapa pendukung berupa *enablers*. *Business academy* adalah akademi yang dibentuk untuk mendidik pegawai dan *stakeholders* agar kompeten dalam menjalankan fungsi organisasi. *Competency schools* adalah sekolah yang dibentuk untuk mendidik pegawai dan *stakeholders* agar memiliki kapabilitas dasar untuk pencapaian visi-misi organisasi. Sedangkan *enablers* adalah pusat-pusat yang dapat menunjang pencapaian visi misi visi-misi organisasi. Pengembangan muatan *learning units* pada struktur di atas telah disesuaikan dengan visi-misi BPKP dan isu-isu strategis, dan telah mengalami pembahasan sampai pada tingkat pimpinan.

GIA Corpu sebagai Kawah Candradimuka APIP

Satu hal yang unik dari pengembangan *Corporate University* di BPKP adalah program pembelajaran yang dirancang tidak hanya untuk pegawai BPKP saja tetapi juga untuk APIP baik di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Karena itulah, konsep Corpu yang awalnya disebut sebagai BPKP *Corporate University* bertransformasi menjadi *Government Internal Audit (GIA) Corporate University*. *GIA Corporate University* telah *soft launching* pada 24 Januari 2019 lalu di Auditorium Gandhi, BPKP Pusat. *Soft launching* merupakan penanda bahwa konsep *GIA Corporate University* telah semakin mantap dan perlu diikuti dengan penyiapan dan pematangan kebijakan-kebijakan pendukung *GIA Corporate University*. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Mei 2019, *Grand Launching* dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian acara peringatan ulang tahun BPKP yang ke-36■

Betrika Oktaresa

Struktur Organisasi

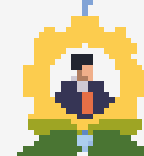
GLA Corpu | Governance, Islamic Audit, Corporate University



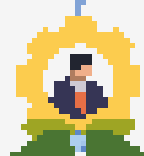
Unit Pendukung

Divisi Pembelajaran

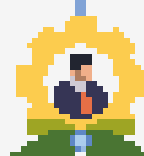
GLA Corp



Penanggung Jawab
Akademi
APDN



Penanggung Jawab
Akademi
SPB



Penanggung Jawab
Akademi
APP dan
TPDD



Koordinator
Program
APDN

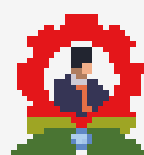


Koordinator
Program
SPB



Koordinator
Program
APP dan
TPDD

Komite



Pemilik
Rumpun
Keahlian
APDN



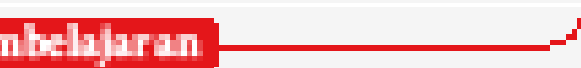
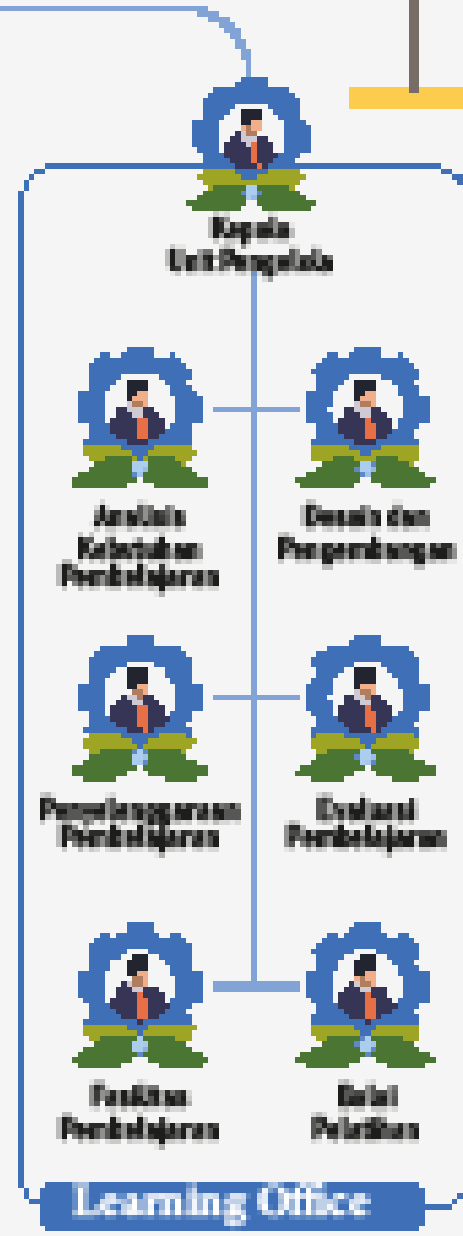
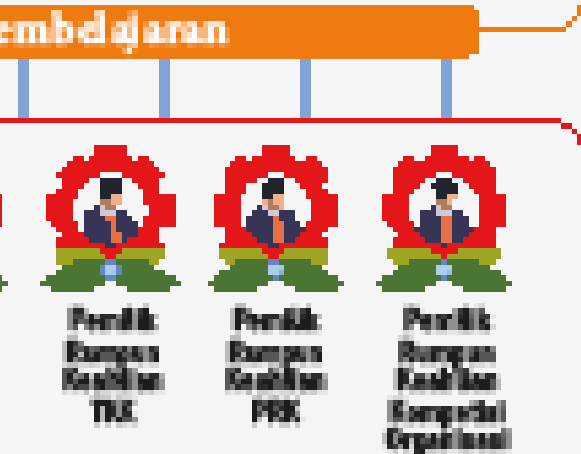
Pemilik
Rumpun
Keahlian
SPB



Pemilik
Rumpun
Keahlian
APP dan
TPDD

Mitra Per







**IA Corpu
Wadah bagi
Komunitas
APIP dan
Stakeholders,**

"Tingkatkan Kompetensi Bangun Tata Kelola yang Baik"

Beradaptasi merupakan respon alamiah bagi organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan yang strategis, agar keberadaan organisasi tetap relevan dengan tuntutan zaman serta mampu memberi nilai manfaat bagi stakeholders-nya. Dalam proses tersebut, organisasi yang adaptif harus melakukan upaya pengembangan yang terus-menerus di berbagai aspek, salah satunya pada aspek kompetensi.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) selaku salah satu aktor penting dalam pengawalan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, harus mampu mempertahankan relevansinya sesuai dengan tuntutan zaman. Kemampuan APIP untuk mengembangkan kompetensinya secara *sustainable* menjadi semakin *urgent*, setidaknya didorong oleh dua hal, yaitu komitmen pemerintah yang semakin nyata terhadap akuntabilitas dan lingkungan strategis pemerintahan yang semakin dinamis di era revolusi industri 4.0.

organisasi APIP, bertepatan dengan HUT ke-36 BPKP diselenggarakan *Grand Launching Government Internal Audit Corporate University* (GIA Corpu). Peresmian peluncuran GIA Corpu ditandai dengan *Handping* atau menapakkan tangan pada tablet yang dilakukan oleh GIA Corpu Chairman sekaligus Kepala BPKP Ardan Adiperdana, didampingi oleh Sekretaris Utama BPKP dan para Deputy Kepala BPKP selaku penanggung jawab program GIA Corpu.

Dalam sambutannya pada acara yang digelar di Auditorium Gandhi, Kantor BPKP Pusat tersebut (31/5), Kepala BPKP



Setelah melalui serangkaian acara dari mulai *soft launching* hingga seminar GIA yang bertujuan untuk mendiskusikan teori, konsep, implementasi CORPU, meningkatkan *awareness* dan *awareship* serta komitmen terhadap proses dan hasil pembelajaran bagi pegawai, unit kerja, dan

Ardan Adiperdana menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memiliki komitmen tinggi terhadap akuntabilitas. "Tidak hanya memerhatikan aspek pencapaian hasil (*program delivery*), Pemerintah juga *concern* dengan aspek akuntabilitas". Kepala BPKP menggarisbawahi bahwa



GIA Corpu dapat dijadikan *strategic tool* bagi organisasi (atau dalam hal ini komunitas APIP) dalam mencapai tujuannya, dengan meningkatkan kinerja organisasi, dan membantu pencapaian sasaran strategis organisasi.”

dengan memerhatikan kedua aspek tersebut secara bersamaan, belanja pemerintah diharapkan dapat dipastikan bermanfaat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dilakukan dengan akuntabel, serta bersifat berkelanjutan.

Ardan menjelaskan bahwa bentuk nyata komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yang menunjukkan bahwa upaya membangun dan menjaga akuntabilitas di lingkungan pemerintahan dilakukan secara terukur melalui peningkatan level maturitas SPIP dan peningkatan level kapabilitas APIP, keduanya ditargetkan mencapai level 3 pada tahun 2019. “Sebagai salah satu dari dua pilar akuntabilitas, APIP jelas harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pengawalan akuntabilitas seraya membantu organisasinya membangun SPIP yang baik.”

Kepala BPKP juga menegaskan bahwa lingkungan strategis pemerintahan menjadi semakin dinamis serta penuh dengan tantangan. Lingkungan yang berubah dengan cepat dan risiko-risiko

baru juga banyak bermunculan merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah. “Sehingga organisasi sangat membutuhkan mata dan telinga ekstra, untuk mengantisipasi risiko maupun memastikan kecukupan pengendalian intern secara keseluruhan. APIP, idealnya mengisi kebutuhan tersebut melalui transformasi peran menjadi *trusted advisor*.”

Ardan kemudian juga menyampaikan bahwa untuk berperan strategis tersebut, tentunya kompetensi APIP harus memadai, relevan, dan adaptif terhadap perubahan. “GIA Corpu, yang kita *launching* pada pagi hari ini, adalah inisiatif yang dilahirkan dalam upaya adaptif merespon kebutuhan untuk mengelola kompetensi APIP, agar senantiasa relevan dengan kebutuhan, serta pengembangan kompetensi dapat berjalan secara berkelanjutan. Corpu dapat dijadikan *strategic tool* bagi organisasi (atau dalam hal ini komunitas APIP) dalam mencapai tujuannya, dengan meningkatkan kinerja organisasi, dan membantu pencapaian sasaran strategis organisasi.”

Pada acara yang dihadiri oleh 291 peserta yang terdiri dari para Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Inspektur pada Kementerian/Lembaga/TNI/Polri, serta Inspektur Provinsi dan Kota, jajaran pimpinan BPKP, serta auditor tersebut, Kepala BPKP mengharapkan agar pengembangan GIA Corpu akan menghasilkan program pembelajaran sebagai solusi pembelajaran yang *Applicable, Relevant, Impactful*, dan *Accesible*, bagi seluruh pegawai, auditor, dan organisasi APIP. “Untuk itu, *tagline* GIA Corpu adalah *Aligning – Performing – Transforming*.”

GIA Corpu merupakan wadah pengembangan kompetensi bersama bagi seluruh komunitas APIP dan *stakeholders* terkait, tidak hanya untuk



BPKP. Oleh karena itu, kebermanfaatan dan nilai tambah yang diberikan oleh GIA Corpu harus dapat dinikmati oleh seluruh pihak terkait. GIA Corpu hadir sebagai mitra strategis bagi pengguna dan *stakeholders* untuk membangun tata kelola yang baik, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang akuntabel. “Sebagai perwujudan dari organisasi pembelajar, GIA Corpu mempunyai visi menjadi *Centre of Excellence* di bidang *Public Sector Internal Audit*, dengan didukung oleh SDM yang berkualitas, metode dan teknologi pembelajaran mutakhir, serta sarana dan prasarana yang bermutu,” tutup Ardan mengakhiri sambutannya■

Betrika

Mengelola Risiko Individu, Pahami

Oleh: Betrika Oktaresa

Prolog

Waktu SMA dulu, saya pernah dapat wejangan dari salah seorang guru, *"nek arep selamat, dadi wong kuwi ora mung ati-ati, tapi kudu waspada"*,

kurang lebih artinya jika ingin selamat dalam hidup, manusia itu tidak cukup hanya berhati-hati, tapi waspada. Ketika itu, saya yang masih muda belia tampan rupawan kemudian bertanya dengan bahasa jawa kromo yang pas-pasan, *"lha bedanipun nopo, Pak?"*. Beliau

kemudian
dengan

semangat menyontohkan, ada orang yang berhati-hati di jalan, berjalan di trotoar dengan asumsi bahwa kendaraan tidak akan sampai kesana. *"Tapi nek ono wong sing lagi nekat nyopire ora bener, yo ketabrak juga, nah, nek wong sing waspada, walopun mlakune neng trotoar tetep ndelokke sekitare, nek ono sing ora beres iso menghindari, ngono"*.

Diskusi saya dengan guru saya beberapa tahun yang lalu tersebut sebenarnya sebuah diskusi tentang manajemen risiko atau lebih rinci, *individual risk management*. Dalam diskusi itu, pak guru membahas tentang adanya *uncertainty* atau ketidakpastian yang melekat dalam setiap hal yang kita lakukan dan harus dimitigasi. Konsep manajemen risiko memang sederhana, ada ketidakpastian yang akan mengganggu kita mencapai tujuan, yang harus diidentifikasi, dianalisis, lalu dimitigasi. Namun, dalam dunia manajemen risiko, ada sebuah ilmu turunan yang sangat penting untuk dipahami yaitu *the psychology of risk*, tentang psikologi manusia ketika menghadapi risiko.

Limitasi Psikologis Manusia

Kali ini, saya akan membahas tentang limitasi psikologis kita sebagai manusia yang harus kita pahami agar mampu mengelola risiko secara benar, dan ini ada kaitannya dengan wejangan dari guru saya saat itu. Langkah awalnya, kita harus memahami bahwa limitasi

Kryptonite-mu



psikologis tersebut merupakan suatu hal yang menjadikan kita manusia, selain beberapa faktor lainnya. Tapi tentu hal itu tidak lantas membuat kita harus berkecil hati, karena *Superman*, sang *superhero*-pun, memiliki kelemahan juga bukan? Ia menjadi lemah ketika harus berdekatan dengan batu *kryptonite*. Lalu kenapa *Superman* bisa bertahan? Karena ia tahu *kryptonite* adalah kelemahannya dan ia harus menghindarinya. Kata kuncinya adalah memahami apa yang menjadi kelemahan kita, menghindarkan kita dari paparan *kryptonite* kita sendiri. Salah satu hal yang menjadi *kryptonite* manusia dalam menghadapi risiko adalah limitasi kita dalam memerhatikan sesuatu (*pay attention*).

Satu hal yang harus kita pahami, terkadang atau lebih sering, kita sebagai manusia menilai terlalu tinggi kemampuan kita dalam memerhatikan sesuatu. Salah satu limitasinya adalah sulit bagi kita untuk memerhatikan dua hal dalam waktu yang bersamaan, misalnya ketika anda mengendarai mobil, anda juga memeriksa pesan yang masuk ke *smartphone* anda, bisakah anda melakukannya? Jika anda melakukan keduanya dan tidak terjadi apa-apa, percayalah itu bukan karena kemampuan hebat anda, namun karena keberuntungan masih menaungi anda. Dalam ilmu psikologi, ketika kita memindahkan fokus atau perhatian kita di antara dua hal, kita tidak hanya kekurangan informasi tetapi juga kekurangan waktu dalam bereaksi. Ada batasan minimum waktu untuk otak manusia memahami situasi dan menemukan cara responnya, atau disebut dengan *biological time*. Sebagai

gambaran, David Strayer, seorang profesor di University of Utah pernah melakukan penelitian tentang fokus manusia ketika mengemudi dan menggunakan ponsel. Strayer menemukan bukti bahwa seorang pengemudi yang melihat ponselnya saat kendaraan berjalan membutuhkan waktu dua puluh lima detik untuk kembali fokus ke kemudinya, bahkan ketika ponsel digunakan saat mobil berhenti karena lampu merah, butuh sepuluh detik untuk *move on* dari distraksi tersebut. Terbayang bukan, ketidakfokusan selama dua puluh lima detik dalam berkendara dapat berdampak seperti apa?.

Lalu, ada limitasi lainnya, yaitu *hangover effect*, dimana manusia akan kelelahan ketika harus bertukar konsentrasi pada dua hal di waktu yang bersamaan atau waktu yang berdekatan. Dalam studinya, seorang profesor psikologi dari San Jose State University, California, bernama Mark Van Selst, menjelaskan bahwa membagi perhatian ke dua hal lebih rumit dari apa yang kita pikirkan. Hal ini karena ketika kita membagi fokus ke dua hal atau dua tugas, kita akan berurusan dengan dua *set detail* informasi di otak kita. Misalnya, ketika kita mengemudi kita harus mengingat jalan mana yang harus dilalui, kondisi jalannya, dan mobil-mobil di sekitar kita. Ketika kita melihat ponsel, kita akan mengingat dengan siapa kita berbicara, apa yang dibicarakan, dan apa yang harus kita katakan setelahnya. Dua *set* informasi tersebut tidak bisa ditampung di otak kita dalam satu waktu karena untuk jenis aktivitas



seperti ini kita menggunakan *working memory*, dimana kita bisa mengakses informasi yang kita butuhkan dalam waktu singkat, namun dengan kapasitas yang kecil. Batasan ini membuat kita tidak dapat menyimpan dua set informasi dalam satu waktu, sehingga harus bergantian. Pertukaran fokus inilah yang menyebabkan kita kelelahan.

Berdasarkan pemahaman di atas, kita dapat memahami bahwa manusia memiliki keterbatasan untuk memerhatikan dua hal dalam satu waktu. Bahkan ketika kita hanya fokus pada satu hal saja pun masih terdapat limitasi lainnya. Pertama, distraksi yang muncul tiba-tiba, meskipun kita sudah berniat untuk berkonsentrasi, akan memecah perhatian kita. Kedua, *mind wandering* atau *task-unrelated thought*. Misalnya, ketika anda sedang mengemudi di jalan raya, tiba-tiba anda akan memikirkan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas mengemudi

anda, itulah yang kita sebut dengan *mind wandering*. Dari berbagai riset yang telah dilakukan, dampak negatif dari *mind wandering* adalah kinerja kita akan terdampak ketika pikiran kita tidak sepenuhnya engaged dengan apa yang sedang kita kerjakan.

Namun, *to be clear*, *mind wandering* tidak selamanya merupakan hal yang buruk. Saat melakukan *mind wandering*, kita bisa memikirkan

apa yang akan kita lakukan nanti sore atau makan malam apa yang akan kita pilih nanti malam. Psikolog menyebutnya dengan *autobiographical planning*. Hal penting yang harus kita pahami adalah *mind wandering* merupakan sebuah distraksi ketika mata kita tetap fokus pada sesuatu yang memang seharusnya kita lihat.

Nah, ketika tiba-tiba pikiran kita bergeser fokusnya sepenuhnya ke hal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang mata kita perha-



tikan, psikolog menyebutnya dengan *perceptual disengagement*, yaitu ketika otak dan mata bekerja namun tidak berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Bahasa sederhananya mungkin, melamun sampai bengong. Terakhir, limitasi kita dalam memerhatikan suatu hal daya tahan tubuh kita. Seorang psikolog bernama Norman Mackworth dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa kemampuan kita dalam melakukan supervisi atau pengawasan akan terus menurun setelah dua puluh sampai dengan dua puluh lima menit, atau disebut dengan *vigilance decrement*.

Epilog

Setelah



memahami beberapa penjelasan di atas, tentu sebagian dari kita akan merasa, “ah masa’ sih? Selama ini sepertinya saya bisa-bisa aja membagi fokus, atau tetap fokus ke suatu hal”. Suatu respon yang wajar memang, karena memang kadang sulit bagi kita sebagai manusia menerima kenyataan bahwa kita memiliki kelemahan. Namun, harus dipahami juga bahwa untuk dapat survive, untuk dapat memitigasi risiko-risiko yang akan kita hadapi, kita harus memahami dulu kekurangan kita, dan menerimanya. Tentu tidak hanya berhenti dengan menerimanya saja, kita harus melakukan mitigasi atas limitasi tersebut. Terakhir, beberapa tahun setelah saya menerima wejangan dari guru SMA saya itu, akhirnya saya bisa mengkritisi wejangan tersebut. Dengan waspada, kita bisa selamat dalam kehidupan, itu merupakan suatu wejangan yang benar namun belum sempurna. Karena untuk terus waspada kita membutuhkan fokus perhatian yang tidak terbelah, dan berbagai penjelasan di atas mengajarkan kita bahwa memerhatikan sesuatu itu tidaklah mudah, bahkan merupakan kelemahan manusia. Artinya, untuk bisa waspada kita harus fokus memerhatikan, untuk fokus memerhatikan kita perlu paham kita memiliki limitasinya, sehingga kita perlu memahami bagaimana menanganinya■

*Penulis adalah Kepala Subbagian Informasi Publik BPKP

10/4 | Tiga Komponen Wujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*

Bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2019 dengan tema “Pembangunan Ketenagakerjaan untuk Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Kita tingkatkan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Korupsi serta Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menuju Pemetaan Seluruh Bidang Tanah di Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Mewakili Kepala BPKP, Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dalam paparannya menyampaikan gambaran opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang menunjukkan adanya peningkatan capaian opini WTP namun masih terdapat pemerintah daerah di Indonesia yang

mendapatkan Opini WDP dan TMP. “Dengan masih terdapatnya Opini WDP dan TMP, ini menunjukkan adanya indikasi bahwa *good governance* dan *clean government* masih belum sepenuhnya dicapai”, ungkap Gatot.

Dalam kesempatan yang sama, Gatot juga menyampaikan keterkaitan antara tata kelola, SPIP, dan APIP yang disebut *The Three Lines of Defence* dalam pemerintahan menuju terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*. Pada setiap tahapan dalam manajemen pemerintahan, semuanya harus ada dari tahap perumusan kebijakan hingga *monitoring* dan evaluasi yang dijaga oleh APIP. SPIP dan APIP adalah dua pilar tata kelola pemerintahan yang baik■



10/4 | Membangun Budaya Korporasi Anti Korupsi



Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan *workshop* tentang Pengembangan Budaya Korporasi Anti Korupsi sebagai Budaya untuk Menguatkan Strategi Preventif Pemberantasan Korupsi. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung BPKP Pusat ini dilaksanakan selama dua hari tanggal 15 s.d 16 April 2019. Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi dalam arahannya mengatakan bahwa acara ini diharapkan dapat

membangun kompetensi sebagai *ruler tools* untuk melaksanakan kegiatan pengawasan preventif ke depan yang harus diperkuat lagi sesuai marwah BPKP. Iswan menambahkan, “Bagaimana kita membangun organisasi yang mapan? Salah satunya menurut pengamatan saya adalah lebih membangun apa yang kita yakini dalam organisasi itu, apa yang mau kita capai”.

“Kita harus membangun kompetensi kita yang paling dasyat, memahami, melaksanakan, mengembangkan yang menjadi filosofi kita bukan sekedar melakukan hal-hal yang teknis yang kita tidak tahu ujungnya. Kita harus sadar betul apa yang kita lakukan itu menuju sesuatu yang ingin kita bangun secara sadar. Dengan *workshop* ini, kita bisa melakukan tugas-tugas secara profesional dan ada standarnya, minimal ada ukuran-ukurannya,” pungkas Iswan■

12/4 | Kementerian LHK Capai Level 3 Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya

Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyerahkan piagam penghargaan atas capaian Level 3 Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Intern Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. Acara yang mengambil tema “Melalui Pengawasan Intern Kita Tingkatkan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani” ini juga mengundang Ketua KPK Agus Raharjo dan Anggota IV BPK RI Rizal Djalil sebagai narasumber.

Dalam arahannya, Menteri LHK Siti Nurbaya memaparkan bahwa Kementerian LHK sedang membangun upaya penguatan pengawasan melalui langkah kolaboratif *stakeholders* yang didukung oleh supervisi dari KPK, BPK, BPKP, DPR dan DPD. Selain itu, Menteri LHK juga menekankan



perlunya menjaga integritas pribadi dan institusi LHK. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP juga memberikan materi mengenai peningkatan kinerja Kementerian LHK melalui pencapaian maturitas SPIP level 4 (terkelola dan terukur). Dalam paparannya, Kepala BPKP menjelaskan bahwa komitmen pada akuntabilitas memang nyata dirasakan sekarang ini. “Pemerintah ini tidak hanya *concern* terhadap bagaimana *delivery* daripada program yang berkualitas, akan tetapi juga akuntabilitasnya”, jelas Ardan ■

24/4 | Sustainable Dinamic Capability



Dalam acara bertema "*Sustainable Dynamic Capability*" yang bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyatakan bahwa Deputy Akuntan Negara harus bisa bersikap dinamis dengan lebih cepat merespon hal-hal strategis. "Adanya reorganisasi di BPKP diharapkan bisa mempertajam kontribusi BPKP terhadap *stakeholders*," ujar Ardan saat membuka acara tersebut. "Dinamis disini artinya kita tidak diam menghadapi perubahan lingkungan. Dalam kondisi dunia lingkungan yang berubah, BPKP harus lebih cepat dan bermanfaat," lanjutnya. Kepala BPKP menyampaikan bahwa kinerja keuangan merupakan salah satu *tools* untuk melihat kondisi kesehatan BUMN. Tidak

hanya dari sisi ketaatan regulasi, BPKP juga mempertimbangkan kinerja keuangan BUMN. Informasi yg termuat dalam kinerja keuangan menjadi alat untuk memantau atau memonitor BUMN tersebut. Perbaikan yang diberikan oleh BPKP harus sesuai dengan perkembangan laporan keuangan BUMN. Oleh karena itu, BPKP dituntut untuk mampu menganalisis laporan keuangan untuk mengetahui keberlanjutan BUMN. Selanjutnya, Deputy Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwijanto menekankan perihal Sumber Daya Manusia Akuntan Negara agar tetap fokus pada pengawasan yang bersifat makro dalam mencapai target RPJMN, serta melakukan inovasi pengawasan. Di akhir pengarahannya, Bonny menjelaskan produk-produk pengembangan kompetensi yang diperlukan bagi SDM Akuntan Negara ■

24/4 | SPIP dan APIP Relevan Dukung *One Observation Policy*



Membuka acara Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional BMKG 2019, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan saat ini terjadi peningkatan potensi bencana yang ditandai

dengan perubahan iklim global dan peningkatan aktivitas seismik serta adanya fenomena terkini bencana Selat Sunda yang merupakan gabungan dari berbagai bencana. Hal ini mendorong BMKG menggagas *One Observation Policy* yang merupakan *roadmap* untuk mengatur koordinasi observasi dari berbagai lembaga, terutama untuk menyinergikan data dan informasi dengan membangun sistem yang terintegrasi.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyatakan peran BMKG untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi mempunyai beberapa risiko dalam penyediaan sarana prasarana dan pembangunan sistem yang terintegrasi. Risiko itu berupa tumpang tindih, *incompatibility*, risiko kemahalan maupun keberlanjutannya. SPIP dan APIP menjadi relevan untuk memitigasi dan mencegah hal tersebut. ■

3/5 | Apresiasi atas Capaian Level 3 Kapabilitas APiP Badan POM

Bertempat di Hotel Lumire Jakarta digelar acara Lokakarya “Reformasi Birokrasi, Pengendalian Kecurangan dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPOM” sekaligus sebagai ajang apresiasi atas capaian level 3 penuh Kapabilitas APiP setelah sebelumnya juga telah mencapai level 3 Maturitas SPIP. Kepala BPKP Ardan Adiperdana memberi selamat dan apresiasi atas komitmen seluruh jajaran BPOM dalam memperkuat kapabilitas APiP. Menghadapi lingkungan strategis saat ini yang *vulnerable, uncertain*, kompleks dan ambigu, peran APiP tidak hanya sekedar *watchdog* tapi harus mengarah ke *trusted advisor* di mana APiP mampu memberi solusi dan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi. Namun, Ardan



mengingatkan bahwa level 3 Kapabilitas APiP masih dapat terjadi penyimpangan apabila terjadi isu integritas. Ardan menyarankan penerapan *Fraud Control Plan* untuk mengatasi hal tersebut.

Kepala BPOM Penny K. Lukito menyatakan terima kasih atas kerjasama dan bimbingan yang telah diberikan BPKP. Penny berharap BPOM dapat terus meningkatkan kapabilitas APiP bahkan hingga level 5■

21/5 | Kaji Kerja Sama, BPKP dan Bhutan Kembali Gelar Video Conference

Kuna menindaklanjuti rencana kerja sama peningkatan auditor intern yang dibahas pada *video conference* bulan April tahun lalu, BPKP kembali menggelar *video conference* dengan *Central Coordinating Agency (CCA) for Internal Auditor, Ministry of Finance, Royal Government of Bhutan* di Kantor Pusat BPKP. Kegiatan yang dipandu oleh World Bank ini membahas butir-butir perjanjian yang akan diatur dalam dokumen perjanjian. CCA Bhutan adalah lembaga pengawasan intern di bawah *Ministry of Finance* Bhutan yang memiliki fungsi mengoordinasikan pengawasan intern di negara Bhutan. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern dan tata kelolanya, CCA Bhutan menunjukkan keseriusannya untuk mempelajari implementasi pengawasan intern di Indonesia melalui BPKP.

Video conference tersebut dipimpin oleh Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia dan *Chief Internal Auditor* CCA Bhutan Pema Wangchen. Rapat dihadiri juga oleh perwakilan pejabat eselon II BPKP. Sebelumnya, rencana kerja sama antara



BPKP dan CCA Bhutan ini telah dibahas dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara RI. Kedua lembaga tersebut memberikan masukan dan hasilnya dikonfirmasi pada CCA Bhutan. Agenda yang dibahas pada *video conference* kali ini, di antaranya terkait peran World Bank dalam perjanjian, pendanaan, klausul-klausul tambahan, jangka waktu, dan ruang lingkup kerja sama. *Capacity building* untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern menjadi tema besar kerja sama antara BPKP dan CCA Bhutan■

Membangun Hubungan dengan Media, Siapa Takut?

Oleh Dian Setyawati*)

Reputasi bagi organisasi merupakan hal penting yang harus dijaga dan ditingkatkan. Tidak sekedar menjaga dan meningkatkan kinerja organisasi, namun juga harus didukung pembentukan opini publik melalui publikasi baik menggunakan *media mainstream*, media internal atau media sosial. Bagaimana mengelola hubungan dengan *media mainstream* menjadi salah satu tugas *public relations* yang penting karena banyak terjadi krisis komunikasi yang diperburuk oleh lemahnya hubungan *public relations* dengan *media mainstream* atau biasa disebut *media relations*.

Istilah *media relations* sendiri menurut Stanley J Baran (2004, 361) sebagai “...the *public relations professional maintain good relations with*

professionals in the media, understand their deadlines and other restraints, and earn their trust”. Sedangkan Yosai Iriantara (2005:32) mengartikan *media relations* merupakan bagian dari fungsi *Public Relations* eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi.

Dapat disimpulkan dengan membangun hubungan dengan media secara profesional dan terukur diharapkan mampu menciptakan kepercayaan yang berdampak saling menguntungkan, organisasi dapat membangun dan menjaga reputasi, media pun mampu memperoleh bahan publikasi untuk mendukung tugas utamanya sebagai *agent of changes* yang mampu menyampaikan informasi



secara adil dan faktual.

Pemerintah pun telah mengaturnya melalui Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2011, dimana praktisi humas pemerintah dalam mengelola hubungan dengan media hendaknya mampu proaktif, menerapkan komunikasi *two way communication*, mampu menjadi fasilitator, mediator dan negosiator serta mampu mengelola isu tidak sekedar menghimpun isu. *Media relations* menjadi salah satu prasyarat dalam membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan media, lihat infografis .

Semakin meningkatnya risiko reputasi di era digital ini, sudah saatnya humas pemerintah mulai membangun *media relations*-nya. Fakta juga menunjukkan pemerintah baik pusat maupun daerah masih mendominasi obyek pemberitaan. Namun demikian, hingga kini masih banyak humas pemerintah yang gamang dalam melakukan *media relations* karena banyaknya persepsi negatif tentang media dan alasan-alasan internal masing-masing organisasi.

Dalam era kebebasan pers saat ini, persaingan media semakin ketat dimana jumlah media di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia mencapai 47 ribu meliputi media cetak, radio, televisi dan terbanyak *media online* (Tirto, 2018). Media dituntut mampu berkarya secara profesional dan wajib mengikuti kode etik yang telah diatur oleh Dewan Pers, walaupun dalam praktiknya masih saja ada wartawan “bodrek/abal-abal” dan jurnalisme “kuning” yang menulis berita berpijak pada ilusi, imajinasi, dan fantasi atau biasa disebut jurnalisme yang menjual sensasi. Namun di tengah maraknya penyebaran berita hoaks melalui media sosial, *media mainstream* diharapkan menjadi penyeimbang karena masih adanya proses *reviu* melalui meja

redaksi.

Mengutip tulisan Sumantri Rahardja (2012) yang berjudul “*Media Relations* di Era Konglomerasi Media”, pemetaan media yang tepat harus dilakukan agar dapat menentukan media mana yang layak menjadi *partner*. Menurut H.S.Bok dkk (2012) kriteria pemilihan media meliputi: (1) Karakteristik media yaitu tingkat kesempurnaan isi, tingkat kewajaran, simbol media, dan kесesingkrоnаn media; (2) Faktor sosial yaitu mencakup tingkat pengaruh media dan tingkat reaksi atau kekritisаn audiens media; (3) Fitur individu, mencakup karakter individu dan tingkat pengalamannya terhadap media dan pesan; dan (4) Faktor kontekstual yaitu mengenai aksesibilitas terhadap media, ketersediaan ruang di media, dan faktor-faktor yang bersifat organisasional.

Selain itu, jenis media, jangkauan media, dan level hubungan organisasi-media juga akan menentukan keberhasilan publikasi. Hubungan organisasi-media tidak hanya bersifat teknis namun juga emosional. Untuk memahami lebih jauh mengenai media, sedikit banyak praktisi humas juga harus memahami kondisi persaingan media. Isu konglomerasi media saat ini menjadi penting, karena banyak media yang membentuk jaringan, bisa dengan *platform* media yang berbeda bahkan dengan usaha-usaha komersil nonmedia. Fenomena yang ada menunjukkan adanya tendensi kepentingan baik terkait sosial politik maupun ekonomi.

Keberhasilan pengelolaan *media relations* oleh praktisi humas pemerintah selain ditentukan kesiapan dukungan baik menyangkut kebijakan, SDM, anggaran dan pemetaan media yang tepat, juga bergantung pada konsistensi kemampuan membangun hubungan baik teknis maupun emosional. Bak pepatah “Tak Kenal Maka Tak Sayang”, memahami dunia media dan keseharian jurnalis menjadi bekal utama membangun *media relations* yang optimal■

*) Penulis adalah Alumnus Program Studi Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana IPB

Kegiatan Hubungan Media

Hubungan yang **harmonis** dan saling menguntungkan antara **humas pemerintah** dan **media** merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi humas pemerintah.

Hubungan media dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan yang meliputi



Temu Media/ *Media Gathering*

Temu media adalah kegiatan temu muka antara humas pemerintah dan sejumlah media secara informal untuk menciptakan hubungan personal yang lebih intensif.



Arahan Media/ *Media Briefing*

Arahan media adalah kegiatan temu muka antar humas pemerintah dan sejumlah pimpinan media secara formal untuk menyampaikan arahan tertentu berkaitan dengan masalah atau kebijakan guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pimpinan media.



Konferensi Media/ *Media Conference*

Konferensi media adalah kegiatan temu muka antara humas pemerintah dan media untuk menyampaikan informasi resmi (konferensi pers) dengan sasaran terciptanya komunikasi 2 arah yang timbal balik dengan wartawan media agar informasi diterima dengan sempurna dan tidak disalahtafsirkan sehingga didapatkan publikasi positif terhadap informasi tersebut.



Siaran Media/ *Media Release*

Siaran media adalah kegiatan pengiriman berita secara berkala kepada media dengan sasaran agar media mendapatkan aktualitas berita mengenai perkembangan kebijakan pemerintah dan mempublikasikannya di media masing-masing.



Kunjungan Media/ *Media Visit*

Kunjungan media adalah kegiatan kunjungan instansi pemerintah ke kalangan media untuk lebih mengenal dan mendapat gambaran secara langsung mengenai proses dan aktifitas operasional media.



Kunjungan Lokasi/ *Set Visit* dan Kunjungan Fasilitas/ *Facilities Visit*

Kunjungan lokasi adalah kegiatan kunjungan media ke instansi atau fasilitas pemerintah agar wartawan media dapat melihat secara langsung kegiatan operasional pemerintah secara transparan.





Wawancara Media/ *Media Interview*

Wawancara media adalah mengundang media tertentu untuk mewawancarai pimpinan instansi pemerintah mengenai isu-isu aktual.

Pendidikan dan Pelatihan Media/ *Media training and Education*

Pendidikan dan pelatihan media adalah program pendidikan dan pelatihan untuk media yang diselenggarakan oleh humas pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan tentang instansi pemerintah.

Pelembaran Isu Penting Media/ *Media Pitching*

Pelembaran isu penting media adalah kegiatan humas pemerintah melemparkan gagasan atau topik tertentu yang sangat penting (media pitching) kepada media secara eksklusif agar dapat dipublikasikan.

Informasi Media/ *Media Information*

Informasi Media adalah penyampaian informasi kepada media agar dapat dipublikasikan atau disebarluaskan.

Ajang Media/ *Media events*

Ajang Media adalah kegiatan humas pemerintah untuk memberikan penghargaan dan mengapresiasi kontribusi media terhadap liputan perkembangan instansi pemerintah.

Peninjauan Media/ *Media Tools*

Peninjauan Media adalah kegiatan humas pemerintah mengundang dan memfasilitasi media tertentu untuk mengikuti perjalanan dan kunjungan terkait dengan kegiatan humas pemerintah.





*36 Tahun Memperkuat Kompetensi
Pengawasan Intern yang Berkelanjutan
Demi Bakti untuk Negeri.*



"There are more important things in life than winning or losing a game"



**Bukan Kalah atau Menang,
yang Penting Semua Senang**



"There are more important things in life than winning or losing a game", ujar Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengutip Lionel Messi saat membuka Pekan Olahraga, Seni, dan Inovasi (Porseni) di halaman Kantor Pusat BPKP.

Upacara Pembukaan Porseni di lingkungan Kantor Pusat BPKP dilaksanakan pada 2 April 2019 dan diikuti oleh pegawai di Kantor Pusat BPKP, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten, dan Pusdiklatwas BPKP. Selain di Kantor Pusat BPKP, upacara pembukaan juga dilaksanakan serentak di 34 kantor perwakilan BPKP seluruh Indonesia. Upacara ini menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan peringatan HUT BPKP. Tahun ini, BPKP memaknai pertambahan usia ke-36 dengan berbagai kegiatan positif bertema utama "Memperkuat Kompetensi Pengawasan Intern yang Berkelanjutan Demi Bakti untuk Negeri" ■



Kita Datang, Kita Riang, Kita Menang

Sepanjang bulan April 2019, Kantor Pusat BPKP dimeriahkan dengan berbagai perlombaan olahraga. Perlombaan olahraga ini merupakan kegiatan tahunan dalam rangka memperingati HUT BPKP dan diikuti oleh semua unit kerja di Kantor Pusat BPKP. Dalam peringatan HUT ke-36 BPKP tahun ini, cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain voli, bulutangkis,



futsal, tenis, tenis meja,
catur, dan gagle.

Antusiasme para pegawai sangat tinggi dalam mengikuti dan menyaksikan perlombaan-perlombaan ini. Terlihat setiap kali unit kerja mereka bertanding, lapangan akan dipadati oleh para suporter dengan yel-yel yang menarik. Para pegawai merasa perlombaan ini sangat bermanfaat sebagai bentuk eskapisme yang positif. Selain itu, perlombaan-perlombaan ini bukan hanya berfungsi sebagai sarana adu taktik dan adu fisik, tetapi juga menjadi sarana silaturahmi para pegawai antar unit kerja dan antar generasi.

Khusus untuk cabang Bulutangkis, selain mengadakan Turnamen Bulutangkis

Piala Kepala BPKP 2019, BPKP juga mengadakan pertandingan persahabatan dengan mengundang kontingen dari Kementerian Luar Negeri, KPK, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, LKPP, PT ASDP, Perum Peruri, dan PPK GBK■





Meski Terpisah Ruang, Kita Masih Berjumpa dalam Doa

Untuk menghormati dan mengenang sejarah para pendahulu, jajaran pimpinan dan warga BPKP yang dipimpin oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana melakukan ziarah ke makam dua mantan Kepala BPKP. Pada 3 Mei 2019, rombongan mengunjungi makam Alm. Arie Soelendro (Kepala BPKP Periode 2000-2006) di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Seminggu berselang, Ardan kembali memimpin ziarah ke makam Alm. Gandhi (Kepala BPKP periode 1983-1993) di TMP Kalibata. Ziarah turut dihadiri oleh keluarga almarhum yang merasa bangga dan berterimakasih karena masih diingat sebagai bagian dari keluarga besar BPKP.

Sebagai penerus BPKP, hendaknya kita dapat menjaga muruah pengawasan intern. Melalui kegiatan ini, tunas muda BPKP turut hadir agar dapat memaknai dan meresapi perjuangan para pahlawan pengawasan. Dalam pesannya, Ardan mengungkapkan bahwa kedua tokoh tersebut telah meletakkan pondasi yang kuat sehingga BPKP dapat tetap berdiri sampai saat ini. "Kejujuran adalah mahkota pengawasan" merupakan kutipan dari Alm. Gandhi yang harus dipegang teguh sebagai nilai-nilai dalam menjalankan tugas, baik di unit pengawasan maupun unit dukungan■



Berasyik Masyuk dengan Musik

"Selamat *enjoy* dan yang penting *happy-happy*. Supaya kita makin kompak untuk meningkatkan kinerja kita bersama," ujar Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia menandai dimulainya acara Festival Band dan BPKP Idol 2019. Benar saja, sehari itu, Kamis (2 Mei 2019), para peserta dan penonton penuh antusias memadati Auditorium



Gandhi hingga akhir acara. Bahkan, penonton tak segan-segan *sing along* dengan wajah sumringah.

Para juri yang diundang hadir di acara ini adalah orang-orang yang kompeten di bidang musik dari berbagai latar belakang. Di akhir acara, para juri ini memilih grup band gabungan dari Pusinfo, Pusbin JFA, Puslitbangwas dan Inspektorat sebagai juara Festival Band 2019. Sedangkan untuk BPKP Idol 2019 berhasil dijuarai oleh Frisca Arta Mulia dari Sekretariat Utama ■



Syukuri dengan Memberi

Rasa haru menyelimuti kegiatan bakti sosial dan kunjungan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPKP. Atas berkah selama 36 tahun berdiri, BPKP melalui DWP berbagi kebahagiaan dengan sesama. Rangkaian kegiatan diselenggarakan dua kali, yaitu 26 April dan 3 Mei 2019. Dua panti yang dikunjungi adalah Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 dan Panti Rawinala. Adapun Supono, Djuhri, dan Rustinah adalah tiga pegawai purnabakti BPKP yang berbahagia mendapat kunjungan.



Di samping itu, atas kerja kerasnya dalam mendukung kelancaran fungsi pengawasan, BPKP memberikan bingkisan bagi pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) dan beberapa warga sekitar BPKP ■





Grand Launching GIA Corpu

Prosesi peluncuran mengingatkan kita pada film-film futuristik dengan kecanggihan teknologi. Ditandai handping oleh Kepala BPKP, Sekretaris Utama, dan jajaran Deputi Kepala BPKP, *Government Internal Audit Corporate University* (GIA Corpu) resmi dirilis.

“GIA Corpu adalah inisiatif yang dilahirkan sebagai upaya adaptif untuk menjawab permasalahan tersebut. Sebagai *strategic tool*, Corpu diharapkan mampu mendukung kinerja organisasi dan membantu pencapaian sasaran organisasi,” jelas Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

Wadah pengembangan kompetensi dengan *tagline alligning, performing* dan *transforming* ini diharapkan mampu menjawab tantangan



kebutuhan pengawasan melalui program pembelajaran yang *applicable, relevant, impactful* dan *acesible* bagi APIP. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan performa pegawai, auditor, dan kinerja organisasi■





Nostalgia Kiprah 36 Tahun BPKP

A *picture worth a thousand words,"* ucap Kepala BPKP Ardan Adiperdana saat membuka pameran foto di Selasar Auditorium Timur Kantor Pusat BPKP, Jakarta (27/5). Tidak lengkap rasanya jika kita tidak menapaki kembali jejak yang telah dibangun oleh para founding fathers BPKP. Melalui Pameran Foto Sejarah Perjalanan BPKP, Ardan mengajak para pegawai untuk menyelami kembali semangat dan inspirasi di setiap momen yang diabadikan. Ia pun berpesan agar generasi penerus BPKP siap untuk menyambut tantangan pengawasan di masa depan dan menjaga *legacy* baik yang telah diturunkan dari generasi ke generasi ■

Tanya:

Apa yang dimaksud dengan penilaian pendahuluan atau survei persepsi dalam proses penilaian maturitas SPIP? Bagaimana mekanismenya?

Jawab:

Penilaian pendahuluan (survey persepsi) merupakan penilaian awal atas maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D berdasarkan hasil survey persepsi pejabat/pegawai yang ditetapkan selaku responden, yang mewakili sekurang-kurangnya dari masing-masing satker K/L/D yang menjadi sampel dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pelaksanaan pengisian kuesioner penilaian pendahuluan (survey persepsi) dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh responden yang didampingi oleh Tim Asessor (panel) maupun secara mandiri/individual oleh responden tanpa didampingi Tim Asessor. Dalam hal pengisian kuesioner penilaian pendahuluan (survey persepsi) dilaksanakan secara panel, Tim Asessor berperan untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan/ Pernyataan parameter dan tidak diperkenankan mengarahkan jawaban kepada responden.

Tanya:

Kenapa penilaian pendahuluan perlu dilakukan? Bagaimana kalau penilaian pendahuluan dilewati dan langsung dilakukan pengujian bukti?

Jawab:

Penilaian pendahuluan (survey persepsi) diperlukan untuk mengetahui gambaran umum persepsi para penyelenggara pemerintahan (K/L/D) selaku responden dalam menyelenggarakan pengendalian intern di lingkup kerjanya sebagai hasil penilaian awal maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D, yang secara teknis

menjadi dasar/acuan untuk pemilihan/penetapan sub-sub unsur SPIP yang diprioritaskan sebagai fokus penilaian dalam tahap pengujian bukti maturitas penyelenggaraan SPIP. Di samping itu, penyelenggaraan SPIP secara konsep dipahami sebagai tanggung jawab seluruh pejabat/pegawai K/L/D, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama/Inspektorat Jenderal/Inspektorat K/L/D selaku Tim Assessor. Oleh karenanya, pelaksanaan penilaian pendahuluan (survey persepsi) diharapkan dapat mengakomodasi peran serta seluruh pejabat/pegawai K/L/D dalam proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sekaligus sarana mengkomunikasikan kembali atas kewajiban menyelenggarakan SPIP bagi K/L/D. Hal ini bisa jadi akan berbeda apabila penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP hanya dilihat dari kepentingan Inspektorat Utama/Inspektorat Jenderal/Inspektorat K/L/D selaku Tim Assessor yang lebih menekankan pada fungsi assurance berupa kegiatan pengujian bukti-bukti maturitas penyelenggaraan SPIP.

Tanya

Apa peran APIP dalam tindak penyimpangan terhadap ketentuan?

Jawab:

Di Indonesia, APIP yang efektif dituntut untuk memberikan peringatan dini kepada manajemen dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (pasal 11 - PP No. 60/2008 tentang SPIP). Dalam upaya penugasan ini, APIP dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi, menilai dan menangani risiko yang ada termasuk risiko kecurangan yang muncul, dengan melakukan evaluasi/penerapan manajemen risiko atau penilaian atas manajemen risiko (termasuk risiko fraud) ■



**Kepala Pusat Pembinaan
JFA BPKP
Edi Mulia**



**Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan BPKP
Djoko Prihardono**

Pertanyaan:

Selamat siang Pak

Perkenalkan saya Andy dari bagian kepegawaian Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Ada Pejabat Es 2 dilingkungan Inspektorat Jenderal berkenan untuk menjadi auditor kembali, adapun BPKP telah memberikan rekomendasi untuk menjadi Auditor Madya, sedangkan beliau sudah lulus menjadi auditor Utama, bagaimana mekanismenya untuk pengangkatan kembali menjadi auditor ?

1. Apakah beliau harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan Eselon 2 nya untuk diangkat menjadi Auditor Madya?
2. Sedangkan beliau berkeinginan untuk menjadi Auditor Utama.
3. Apakah pengundurannya menunggu setelah proses Auditor Utama-nya keluar ? Mohon arahannya, Terimakasih.

Andy
(ferdyandi@yahoo.com)
Inspektorat Jenderal Departemen Perdagangan
| Jakarta | Provinsi DKI Jakarta

Jawaban:

Sesuai dengan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS yang ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional (Jabatan Struktural), dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

Prosedur Pengangkatan kembali diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan dari JFA. Pejabat yang berwenang mengangkat kembali ke dalam jabatan Auditor adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BPKP.

Sesuai dengan aturan tersebut di atas, Pejabat Eselon 2 di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor Madya, dan harus diberhentikan dari jabatan Eselon II pada saat yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor Madya.

Selanjutnya, karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Auditor Utama, maka dapat diproses kenaikan jabatan Auditor Utama.

Mengingat bahwa kewenangan pengangkatan pejabat fungsional ahli utama berada pada Presiden dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden, maka prosedurnya mengacu kepada Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-143/M. Sesneg/D-3/AP.01/02/2018 hal Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Salam

Pertanyaan:

Selamat siang Pak

Saya dilantik menjadi pejabat struktural di Dispora satu tahun yang lalu dan saya berniat untuk kembali menjadi pejabat fungsional Auditor. Saya telah memiliki SK pembebasan sementara.

Pertanyaannya, langkah apa yang terbaik yang harus saya lakukan? Kalau saya mengundurkan diri dari pejabat struktural apakah saya harus pindah ke inspektorat dulu atau saya menunggu SK pengangkatan kembali yang menyatakan saya diangkat kembali menjadi PFA?

Ramdoni - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Jawaban

Sesuai dengan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS yang ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional (Jabatan Struktural), dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Auditor karena ditugaskan menjadi pejabat struktural harus mendapat persetujuan teknis dari Kepala BPKP.

Langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Pejabat yang Berwenang mengajukan permintaan penerbitan persetujuan teknis pengangkatan kembali Saudara kepada Kepala BPKP. Persyaratan terkait permintaan penerbitan persetujuan teknis mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER- 709 /K/ JF/2009 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pem-

berhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Auditor. Selama berlangsungnya proses ini Saudara belum perlu mengundurkan diri dari jabatan struktural di Dispora.

2. Selanjutnya berdasarkan persetujuan teknis dari Kepala BPKP, Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat mengangkat Saudara kembali ke dalam Jabatan Fungsional Auditor sekaligus memberhentikan dari jabatan struktural di Dispora dan memindahkan Saudara ke Inspektorat sebagai unit kerja yang baru.

Salam,

Pertanyaan:

Selamat siang Pak. Apakah pada tahun 2019 ada jadwal *inpassing* auditor? Kalau ada kapan dan dimana? terima kasih atas jawaban.

Adriana M. Gabi - Bawasda Kab. Timor Tengah Utara

Jawaban

Sesuai dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2018, Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021.

Saat ini Pusbin JFA sedang mempersiapkan perangkat peraturan untuk menindaklanjuti peraturan di atas.

Apabila perangkat aturan tersebut telah siap, kami akan segera menyampaikan kepada pimpinan unit APIP dan menyediakan informasi terkait *inpassing* di *website* Pusbin JFA

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Pak Edi Mulia dan Pak Djoko Prihandono. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi **Warta Pengawasan**

NGOBROL BARENG SUTRADARA FILM Keluarga Cemara



“Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga”, membaca kalimat ini, sebagian besar dari kita pasti tidak akan membacanya dengan cara biasa, melainkan mendendangkannya dengan nada. Tidak heran memang, karena lagu berjudul “harta berharga” yang menjadi OST sinetron ‘Keluarga Cemara’ sudah akrab menyapa masyarakat Indonesia lewat layar kaca sejak tahun 1996 sampai dengan 2005, hampir satu dekade. Menariknya, tahun ini, Gaung cerita dan OST Keluarga Cemara tersebut kembali menyapa masyarakat Indonesia melalui layar lebar, bahkan berhasil menjadi Film Indonesia pertama yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada tahun 2019.



Pada edisi kali ini, Tim Warta Pengawasan mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan salah satu sosok di balik kesuksesan film tersebut yaitu sang Sutradara Yandy Laurens.

Menjadi seorang sutradara merupakan passion sejak kecil atau kebetulan?

Dulu mau jadi pemain basket, cukup serius. Dari SMP itu kalau ditanya kakak saya mau jadi apa? Saya selalu jawab jadi pemain basket. Planning-nya, saya nanti umur 30 tahun mau jadi pelatih dan di umur 40 tahun saya pensiun dari pelatih jadi pengurus Perbasi (Persatuan Basket Seluruh Indonesia-red). Jadi saya akan kerja di dunia yang saya suka meski enggak kaya-kaya amat tapi saya suka. Terus, enggak sengaja kakak kelas saya mau tampil di sekolah, saya diminta nulis ceritanya, karena kakak kelas saya itu tahu saya suka bikin drama di gereja. Ternyata mereka dapat nilai bagus sampai kabar itu nyebar, lima kelas lain juga nyari saya minta dibantu juga. Setiap kelas ngasih saya 50 ribu, jadi dapatlah 300 ribu saya kasih ke mama saya. Dari situ saya yakin bahwa ada passion saya yang lebih besar dari basket. Selain itu, saya juga menyadari dari TK saya suka menggambar dan menulis, jadi saya semakin yakin sepertinya jalannya memang kesana. Saya juga waktu itu tidak sengaja menemukan buku yang ditulis oleh Naratama, seorang dosen IKJ (Institut Kesenian Jakarta-red) berjudul "Menjadi Sutradara Televisi", dari situ saya baru tahu ada profesi tersebut, dan menggerakkan saya

untuk mencari tahu lebih jauh ke IKJ. Dari hari itu saya sudah yakin mau jadi sutradara.

Lalu tentang webseries "Sore", bisa diceritakan? Apa itu karya pertama yang dibuat?

Sebenarnya sejak kuliah sudah bikin video dan dikirim ke lomba atau festival, sampe tugas akhir kuliahnya, itu bikin film pendek juga. Film pendek itu tayang di Paris, Tokyo, festival kecil sih. Film itu menang di FFI (Festival Film Indonesia) tahun 2012. Terus, XXI bikin film festival dan menang juga dapet 3 penghargaan. Jadi sebenarnya mulai dari film pendek itu. Ternyata setelah lulus mau bikin film panjang gak mudah. Sampai mulai tuh di youtube banyak campaign, Teman saya ngajakin buat film di festival film di Italia. Semacam summer camp film gitu, cuma masih bingung mau tayang dimana, sampai diputuskan bikin series yang tayang di Youtube. Akhirnya kami mengembara ke Italia dengan budget seadanya. Waktu itu kami sudah membuat 8 episode, Tropicana Slim liat dan mau dibeli. Makanya, di episode 9 baru ada product placement, jadi sejak saat itu ada kepercayaan yang coba saya bangun bahwa teman-teman brand bisa kok 100% mempercayakan ceritanya ke pembuat filmnya tapi delivery pesan produknya bisa tetap tersampaikan.

Terus, buat Yandi, apakah ada satu film yang menjadi inspirasi?

Sebenarnya yang paling memengaruhi saya dalam berkarir itu Mas Riri (Riri Riza-red), jadi bisa dibilang saya lebih dulu jatuh cinta sama orangnya daripada



sama filmnya. Dia (Riri-red) adalah dosen penyutradaraan film panjang di kampus saya, dia jadi role model bagi saya. Saya merasa Mas Riri ini antithesis dari stereotype sutradara pada umumnya. Ya, orangnya sederhana, artikulatif, sangat senang sama budaya gitu. Sampai cara shooting akhirnya saya belajar dari Mas Riri.

Lalu, di setiap pekerjaan kan selalu ada kesulitan, mungkin bisa diceritakan seperti apa kesulitan yang pernah dilalui?

Tantangan setiap bikin project itu bagi saya adalah ketika sudah bikin suatu karya, misal "Sore" itu bagus, tidak ada jaminan karya yang saya bikin selanjutnya juga bagus. Jadi peluangnya sampai kapanpun tetap fifty-

fifty, bahwa saya bikin Film Keluarga Cemara bisa mencapai jumlah penonton sekitar 1,7 juta tidak ada jaminan kalau saya buat selanjutnya tetap sama. Jadi saya memilih untuk yakin, jangan bernafas dari kemuliaan masa lalu. karena itu keberhasilan kemarin tidak jadi beban.

Terkait pengembangan kompetensi, apakah sekolah film itu penting?

Kalau orang nanya ke saya, penting gak sekolah film? Tergantung. Yang paling penting apapun itu bidang yang kita tekuni, kita harus mencintai literasi, kita mencintai pendidikannya, mau caranya workshop, atau mentoring. Saya gak suka kelas, saya lebih suka belajarnya melalui nonton-nonton filmnya, tapi harus tetap harus baca buku, harus ada lawan diskusi, harus punya mentor yang bisa diajak ngobrol. Pada dasarnya saya percaya ilmu itu kan pengalaman yang diekstrak menjadi kata-kata gitu, nah itu akan mempercepat proses



belajar kita. Bahwa metodenya melalui kelas maupun non kelas, kembali ke selera masing-masing. Dan kalau diliat dari kacamata yang lebih besar dan bukan personal bagi saya, sekolah film itu penting, harus lebih banyak sekolah film.

Selain penambahan sekolah film di Indonesia apa harapan anda untuk film Indonesia?

Industri film kita arahnya lagi bertumbuh dengan baik, daftar negatif investasi asing sudah dicopot di pemerintah saat ini. Di daerah-daerah saat ini kan masih sangat kurang bioskopnya, ada satu kota cuma punya satu. Nah selain itu, disaat yang sama festival film pendek harus dihidupkan kembali. Kenapa? karena sutradara kayak saya misalnya dan ada banyak yang lain itu memulai karirnya dari film pendek. Film pendek dan festivalnya adalah sebuah sirkuitnya filmmaker, sebagai komunitas atau sekolah film, bikin film, dan pemutarannya. Filmnya menang gak menang itu urusan nanti, tapi waktu filmnya ditonton orang dan melihat film lain itu akan memberi semangat untuk bikin lagi. Nah, proses itu bagi si filmmaker atau sutradara adalah proses menemukan siapa dirinya. Selain itu, disaat yang sama, festival film pendek adalah wadah bagi produser untuk mencari.

"....Saya memilih untuk yakin, jangan bernafas dari kemuliaan masa lalu. karena itu keberhasilan kemarin tidak jadi beban...."

Mungkin ada tips-tips buat teman-teman punya passion di dunia film?

Masuk sirkuit film pendek dan pahami dulu bentuk film pendek. Saya ngajar di IKJ dan masalah besar mahasiswa adalah tidak paham apa itu film pendek. Karena masalah utamanya itu orang banyak salah kaprah tentang film pendek, yang terjadi adalah film panjang dipendekin atau film panjang diambil potongannya lalu diceritain.

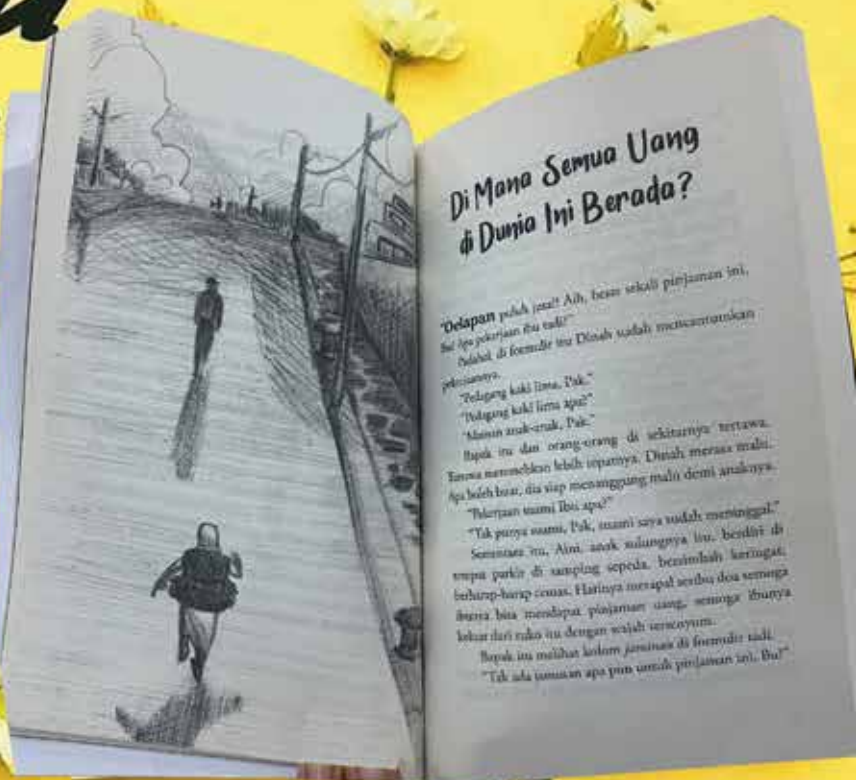
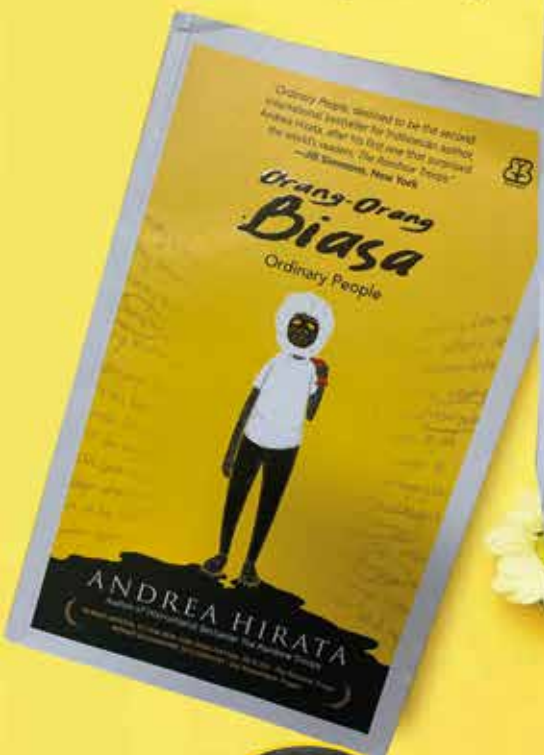
Sebagai penutup, ada pesan penyemangat bagi pembaca Majalah Warta Pengawasan?

Jangan takut melangkah, lakukan yang terbaik, sesalah-salahnya pun pasti datang kebaikan untuk itu, beri ruang untuk diri kita bertumbuh■

Suryo Cahyo Putro dan Nadia Khaerunnisa

Orang-Orang Biasa

Ordinary People



ANDREA HIRATA

Author of International Bestseller *The Rainbow Troops*

Winner General Fiction New York Book Festival 2013 USA - *The Rainbow Troops*
Winner Buchawards 2013 Germany - *Die Regenbogen - Truppe*

“... biasanya orang idealis itu pintar. Ternyata jika seseorang idealis, tetapi dia bodoh, pekerjaannya hanya akan menuju pada suatu hal: kurungan penjara!” – Andrea Hirata

Belantik adalah kota yang naif. Entah ke mana perginya orang-orang kriminal di sana. Yang pasti, kondisi tersebut membuat kedua polisi di kota itu, Inspektur Abdul Rojali dan polisi muda Sersan P. Arbi, sedikit mengalami krisis identitas. Sama halnya dengan warganet yang berpikiran “untuk apa ada *cleaning service* kalau harus buang sampah pada tempatnya?” Dua orang itu mulai mempertanyakan eksistensi profesi mereka. “Aman-aman saja, buat apa ada polisi?”

Namun, tanpa mereka sadari, sebuah rencana perampokan bank tengah diramu oleh sepuluh sekawan di sebuah ruangan kedap suara yang seantero dindingnya dilapisi bekas kemasan telur. Melihat perencanaan perampokan yang sangat lugu dan sopan, akankah perampokan tersebut berhasil? Benarkah Belantik yang selama ini dikenal sebagai kota yang

aman memanglah tentram dan jauh dari prasangka?

Di buku ke-11-nya ini, Pak Cik, begitu penulis akrab dikenal, menyuguhkan sebuah kisah satir tentang kehidupan orang-orang biasa, dengan problem hidup yang terlalu biasa, namun mencari jalan keluar yang tidak biasa. Adalah sepuluh sekawan yang terdiri dari Debut, Handai, Tohirin, Honorun, Sobri, Rusip, Salud, Nihe, Dinah, dan Junilah yang merencanakan perampokan tersebut. Mereka merupakan sekelompok anak bodoh, aneh, dan gagal, langganan kursi belakang sekolah yang bersahabat dan kini berniat untuk melakukan tindak kriminal demi sebuah tujuan mulia: menyekolahkan Aini, anak Dinah yang tidak kalah bodoh dengan emaknya tersebut, ke Fakultas Kedokteran!

Detil cerita mengenai kisah Aini yang gigih, duet bernuansa *bro-mance* Inspektur dan Sersan, serta laku sepuluh rampok amatir itu mencampuraduk emosi pembaca dari terharu-biru hingga terbahak

yang mengeluarkan air mata. Dari awal hingga bagian tengah buku, Pak Cik menampilkan kisah para tokoh utama tersebut secara bergantian dengan sudut pandangnya masing-masing. Alurnya yang pelan dan runut nyatanya akan menuntun kita pada sebuah plot twist yang menyenangkan. Puncak cerita akan mulai dirasakan pembaca setelah melewati sekitar $\frac{3}{4}$ bagian cerita. Jadi saya sarankan untuk bersabar mengikuti kisah mereka karena apa yang akan pembaca temui di akhir kisah ini akan sangat menyegarkan. Tidak hanya oleh jalan cerita, pembaca pun akan tersentil dengan kritik-kritik sosial yang disampaikan Pak Cik di sela-sela kisah.

Jika nilai-nilai kejujuran dan integritas biasanya kita temui pada buku cerita anak-anak, dalam buku *Orang-Orang Biasa* ini, Pak Cik mengemas kedua nilai tersebut secara apik sebagai sebuah sindiran atas fenomena korupsi dan *money laundry* yang menjamur di era ini■

Nadia Khaerunnisa

PRASANGKA MENGABURKAN FAKTA



Twelve Angry Men (1957)

Tanggal Rilis : 10 April 1957 (Fox Wilshire Theatre)

Negara Asal : Amerika Serikat

Sutradara : Sidney Lumet

Produser : Henry Fonda, Reginald Rose

Penulis Cerita : Reginald Rose

Penulis Naskah : Reginald Rose

Sinematografer : Boris Kaufman

Editor : Carl Lerner

Durasi : 96 Menit

Seorang remaja berusia belasan duduk di kursi pesakitan karena dituduh membunuh ayahnya. Hidup remaja ini tergantung pada dua belas orang juri yang harus memutuskan apakah dia bersalah atau tidak. Sepertinya remaja ini tidak akan lolos karena alibinya benar-benar lemah. Namun, pada saat voting, Juri #8, salah satu dari dua belas orang juri tersebut memilih menyatakan tidak bersalah karena dia tidak benar-benar yakin. Atas dasar *reasonable doubt*, juri tersebut mempertanyakan apakah remaja ini benar-benar bersalah dan merasa bahwa ia harus benar-benar yakin mengenai hal ini sebelum mengirim remaja tersebut ke kursi listrik. Agar vonis bisa diputus dan sidang bisa diselesaikan, kedua belas juri haruslah satu suara dalam menyatakan remaja itu bersalah atau tidak. Hal ini akhirnya memicu kehebohan dan perdebatan sengit di antara kedua belas juri tersebut. Lantas, bagaimanakah putusan yang diambil pada akhirnya?

Film monumental produksi tahun 1957 ini diangkat dari sebuah drama populer berjudul sama. Saking populernya, sejak pertama kali dipentaskan pada tahun 1954,



tidak terhitung sudah berapa kali cerita ini diceritakan ulang, diadaptasikan, bahkan diparodikan melalui berbagai media. Bahkan, *Library of Congress* Amerika Serikat merasa perlu mengawetkan film ini melalui National Film Registry karena film ini dianggap "*culturally, historically or aesthetically significant*". Sekedar informasi bagi anda yang percaya dengan rating, film ini memperoleh rating 100% dari kritikus di situs Rotten Tomatoes.

Salah satu hal yang menarik dari film ini adalah kesederhanaannya. Hampir keseluruhan film hanya berlatar di satu ruangan tempat para juri berdebat. Penulis cerita ini pun merasa tidak perlu repot-repot memberikan nama pada para juri tersebut. Mereka hanya dikenal sebagai Juri #1, Juri #2, dst. Apalagi setiap juri adalah orang-orang biasa dengan watak dan perilaku khas manusia biasa yang bisa kita temui dalam keseharian kita. Namun di balik kesederhanaan ini, plot, sinematografi, dan akting dalam film ini patut diacungi jempol. Setiap karakter memiliki perwatakan yang kuat dan mampu dibawa secara mumpuni oleh para aktornya. Ekspresi para aktor dan dialognya yang kompleks mampu menangkap suasana pergolakan batin

dengan baik. Sedikit demi sedikit, penonton akan digiring berpikir seperti detektif yang sedang menyelidiki suatu kasus. Seiring perdebatan yang memanas, akan terungkap latar belakang masing-masing juri dan apa yang mempengaruhi setiap keputusan yang mereka ambil. Setiap kali salah satu juri mengemukakan argumennya, kamera akan mengambil gambar secara *close up* untuk menangkap ekspresinya dengan baik, yang membantu penonton merasakan langsung betapa panas dan intensnya perdebatan di ruangan tersebut.

Sekedar membagi pengalaman, menonton film ini memunculkan renungan, seberapa jauh prasangka dan keyakinan kita bisa mengaburkan fakta yang kita percaya? Seberapa sering kita membiarkan fakta hanya agar memiliki alasan untuk mempercayai apa yang ingin kita percaya? Terlebih lagi, perkembangan plot dari film ini membuat kita merenung dan belajar, bahwa mengambil keputusan secara terburu-buru bukanlah hal yang baik dan seringkali pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil hanya didasari atas fakta yang dikaburkan oleh prasangka. Selamat menonton, pembaca■

Gilang R. Hastanto

12 ANGRY MEN

"Bukan harapan, cita-cita, dan cinta saja yang digantung. Ternyata Sukabumi memiliki jembatan gantung terpanjang di Indonesia."

Bagi beberapa dari kita, hasrat untuk menjelajahi tempat baru selalu tinggi, namun keinginan itu kadang sulit terwujud karena harga tiket pesawat yang sedang tinggi. Terutama bagi kita yang berencana mengunjungi daerah wisata yang jauh. Nah, tidak perlu berkecil hati, dari keterbatasan ini justru penulis ingin berbagi pengalaman untuk mengatasi masalah itu.

Jadi begini, penulis melakukan pencarian pada mesin penjelajah google dan berharap menemukan objek wisata yang bagus untuk dikunjungi, berbiaya terjangkau, dan layak untuk dipajang di halaman akun media sosial kita, atau bahasa anak gaulnya, *instagramable*.

Salah satu tempat wisata yang penulis

**YUK, JALAN - JALAN
KE JEMBATAN GANTUNG**

rekomendasikan adalah Jembatan Gantung Situ Gunung yang masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau disingkat TNGGP. Kawasan TNGGP berada pada 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Siap mengikuti perjalanan penulis? Yuk kita mulai. Dalam perjalanan kali ini, penulis menggunakan KRL menuju Stasiun Bogor, menyebrang melalui JPO, dan berjalan selama 10 menit ke Stasiun Paledang. Perjalanan menuju Sukabumi menggunakan kereta hanya dapat dilakukan melalui stasiun ini. Terdapat dua pilihan kelas kereta, kelas ekonomi dengan harga Rp35.000,00 dan kelas eksekutif dengan harga Rp70.000,00. Stasiun yang menjadi tujuan adalah Stasiun Cisaat karena jaraknya paling dekat dengan Gerbang TNGGP dan memakan waktu selama 2 jam perjalanan.

Tiba di Stasiun Cisaat, jangan heran apabila langsung banyak tawaran dari pengemudi ojek ataupun angkot untuk mengantarkan ke tempat yang kita tuju, yaitu Situ Gunung. Harga untuk jasa antar ini berada di kisaran Rp25.000,00 hingga Rp35.000,00, tentu dengan

syarat lihai dalam melakukan tawar menawar dan memiliki keterampilan berbahasa Sunda minimal tingkat pemula. Berhubung kemampuan Bahasa Sunda penulis terbatas pada kumaha, sabaraha, dan nuhun kang, maka harga yang harus penulis bayar untuk jasa antar ini adalah sebesar Rp50.000,00.

Jembatan Gantung Situ Gunung

Tiket masuk ke dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah sebesar Rp18.500,00 per orang. Dengan tiket seharga tersebut, penulis dapat menikmati fasilitas yang ada kawasan tersebut akan tetapi tidak termasuk tiket Jembatan Gantung Situ Gunung. Tiket untuk dapat menggunakan Jembatan Gantung Situ Gunung seharga Rp50.000,00 sudah termasuk *welcome drink* dan *snack* yang biasanya berupa jagung, kacang, dan pisang rebus dengan minuman teh hangat atau bandrek. Sebelum menyebrang, setiap orang akan dipasangkan sabuk pengaman. Bukan karena tidak aman, namun apabila tiba-tiba angin kencang berhembus, kita bisa mengkaitkan ke tali yang ada di sepanjang jembatan supaya lebih aman.



Jembatan Gantung Situ Gunung ini adalah Jembatan Gantung terpanjang di Indonesia dengan panjang 243 meter di atas ketinggian jurang kurang lebih 150 meter. Kayu yang digunakan untuk jembatan terbuat dari Kayu Ulin yang berasal Papua atau dikenal juga dengan Kayu Besi. Kayu ini dipilih dengan alasan tahan lama dengan perubahan suhu, kelembaban, dan tidak mudah dimakan rayap. Pembangunan jembatan gantung ini memakan waktu sekitar 1 tahun dimulai pada bulan Mei 2017 dengan biaya sebesar 4 Miliar Rupiah. Dalam sekali menyeberang jembatan gantung ini dapat menampung sebanyak 40 orang dalam kondisi berjalan, tidak diam di tempat.

Patuhi juga aturan dan larangan yang tertera pada papan pengumuman sehingga keselamatan tetap terjaga baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain.

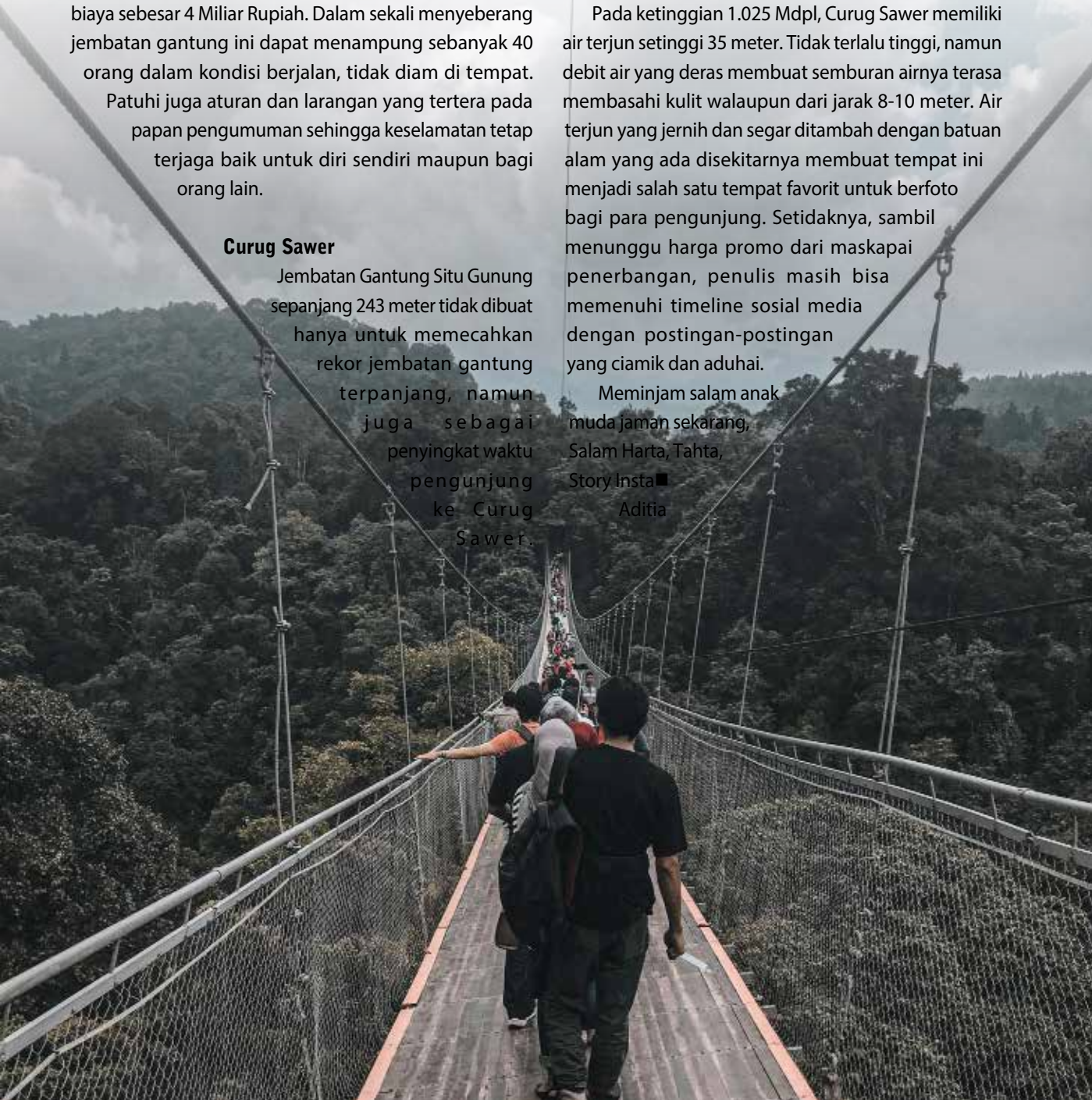
Curug Sawyer

Jembatan Gantung Situ Gunung sepanjang 243 meter tidak dibuat hanya untuk memecahkan rekor jembatan gantung terpanjang, namun juga sebagai peningkat waktu pengunjung ke Curug Sawyer.

Setelah menyeberangi Jembatan, berjalan kaki sekitar 10-15 menit, maka penulis sampai di kawasan Curug Sawyer yang dari jauh sudah terdengar suara deburan airnya. Karena telah dikelola dengan baik, Pengelola TNGGP sudah mempersiapkan fasilitas bagi pengunjung, dari mushola sampai deretan penjual makanan yang diberikan tempat yang rapi. Selain itu, sepanjang jalan juga, penulis jarang melihat ada sampah yang berserakan.

Pada ketinggian 1.025 Mdpl, Curug Sawyer memiliki air terjun setinggi 35 meter. Tidak terlalu tinggi, namun debit air yang deras membuat semburan airnya terasa membasahi kulit walaupun dari jarak 8-10 meter. Air terjun yang jernih dan segar ditambah dengan batuan alam yang ada disekitarnya membuat tempat ini menjadi salah satu tempat favorit untuk berfoto bagi para pengunjung. Setidaknya, sambil menunggu harga promo dari maskapai penerbangan, penulis masih bisa memenuhi timeline sosial media dengan postingan-postingan yang ciamik dan aduhai.

Meminjam salam anak muda jaman sekarang,
Salam Harta, Tahta,
Story Insta ■
Aditia



#KataSobwas

"Apa harapan Sobwas
utk **BPKP** ke depannya?"



“Semakin dapat mengembangkan segala aspek profesi auditor internal pemerintah di Indonesia
@indrairwan”

“Bisa mengembangkan konsep fun office
@cfr_1502”

“Memperbanyak beasiswa untuk pengembangan profesi
@erikapristiwati”

“Diklat gratis untuk APIP daerah, min
@vegaira”

“Semoga BPKP semakin jaya, terdepan, dikenal masyarakat luas dan disegani semua pihak
@atyswift”

“Terus maju, terus berkembang, terus jaya!
@naufalizha”

“BPKP benar-benar mengawal pembangunan dan menguatkan keakuntabilan keuangan negara
@murniana.s”

“Semoga semakin jaya dalam upaya membangun Indonesia yg lbh baik. Semoga aku bisa jd ASN di BPKP
@rachma_mia”

“Lebih baik, solid, dan sukses semua dalam rangka melakukan audit di negara Indonesia ini
@satrio_bayu17”

“Diklat pembentukan ditambah jadwalnya
@rosita.ayusaras”

“Semakin menghantar Indonesia menjadi lebih baik #nyataakuntabel
@petrussonny”

“Semoga selalu jaya dan meningkat kinerjanya
@verylla”



BPKP
JAYA!

| DIRGAHAYU
| BPKP